

Pengantar Ilmu Pendidikan

Pendidikan bukan sekadar proses belajar, melainkan usaha sadar untuk menuntun manusia menuju kedewasaan dan kemanusiaan yang utuh.

Buku *Pengantar Ilmu Pendidikan* disusun untuk membantu pembaca memahami pendidikan secara mendasar, sistematis, dan kontekstual.

Melalui pendekatan konseptual dan reflektif, buku ini mengajak pembaca menelusuri makna pendidikan, kedudukannya sebagai ilmu, serta peran strategisnya dalam kehidupan individu dan masyarakat. Pemikiran para tokoh pendidikan dan kebijakan pendidikan nasional disajikan secara terintegrasi untuk memperkuat pemahaman tentang pendidikan sebagai proses pemanusiaan manusia.

Dengan bahasa yang lugas dan sistematis, buku ini mendorong pembaca untuk berpikir kritis, beretika, dan bertanggung jawab dalam memandang dan menjalankan praktik pendidikan. *Pengantar Ilmu Pendidikan* dirancang sebagai pegangan awal yang relevan bagi mahasiswa kependidikan, calon pendidik, dan pendidik dalam membangun landasan berpikir dan bersikap di dunia pendidikan.



Jl. Pramuka 139 Ponorogo
<http://bukunatakarya.com/>
+62852-3281-3769
bukunatakarya@gmail.com



ISBN : 978-623-8763-63-4



Pengantar Ilmu Pendidikan

Siti Zazak Soraya, Mukhlison Effendi



Siti Zazak Soraya, Mukhlison Effendi

Pengantar Ilmu Pendidikan



Pengantar Ilmu Pendidikan

Siti Zazak Soraya
Mukhlison Effendi

CV. Nata Karya

Pengantar Ilmu Pendidikan

Hak Cipta @
Siti Zazak Soraya
Mukhlison Effendi

ISBN : 978-623-8763-63-4

Layout : Team Nata Karya
Hak Terbit © 2026, Penerbit : CV. Nata Karya
Jl. Pramuka 139 Ponorogo
Telp. 085232813769
Anggota IKAPI

Email : Penerbit.natakarya@gmail.com
Web : bukunatakarya.com

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Seseorang yang dengan sengaja dan tanpa memiliki izin melakukan tindakan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dapat dihukum dengan pidana penjara minimal 1 (satu) bulan dan/atau denda setidaknya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan buku **Pengantar Ilmu Pendidikan** ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw, *uswah hasanah* bagi umat manusia, yang akhlaknya patut untuk senantiasa diteladani.

Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan referensi dan memberikan pemahaman materi secara komprehensif, sehingga dapat berfungsi sebagai landasan dalam memahami konsep dan praktik pendidikan dalam kehidupan sehari – hari. Melalui buku ini, diharapkan pembaca memperoleh pengetahuan yang memadai .

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan buku ini. Penulis juga mengharapkan kritik saran yang konstruktif demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi seluruh calon pendidik maupun para pendidik di Indonesia.

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB 1 Hakikat, Tujuan, dan Fungsi Pendidikan	1
BAB 2 Faktor – Faktor Pendidikan	25
BAB 3 Lembaga – Lembaga Pendidikan.....	42
BAB 4 Pendidikan Sebagai Sistem.....	55
BAB 5 Landasan – Landasan Kependidikan	67
BAB 6 Sistem Pendidikan Nasional	89
BAB 7 Aliran – Aliran dalam Pendidikan	112
BAB 8 Pendidikan Seumur Hidup.....	132
BAB 9 Demokrasi Pendidikan	153
BAB 10 Inovasi Pendidikan.....	170
BAB 11 Tokoh – Tokoh Pendidikan.....	192
BAB 12 Penguatan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa.....	230
Daftar Pustaka	253

BAB 1

HAKIKAT, TUJUAN, DAN FUNGSI PENDIDIKAN

A. Hakikat Pendidikan

Secara etimologis, pendidikan menurut Bahasa Yunani adalah *paedagogie*, yang akar katanya dari *pais* yang berarti anak dan *again* yang artinya membimbing. Jadi *paedagogie* berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Orang Romawi memandang pendidikan sebagai *educare*, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai *Erziehung* yang setara dengan *educare*, yakni membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan/potensi anak. Dalam bahasa Jawa pendidikan berarti *panggulawentah* (pengolahan), mengolah, mengubah, kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran dan watak, mengubah kepribadian sang anak. Dalam kamus

besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar “didik” lalu diberi awalan kata “me” sehingga menjadi “mendidik” yang artinya memelihara dan memberi latihan (ajaran pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Dalam Bahasa Inggris, pendidikan identik dengan *education*. Kata kerja *educate* adalah pemberian intelektual, moral dan instruksi social guna melatih atau memberi informasi kepada subyek tertentu. *Education* sendiri bagian dari poses edukasi atau menjadi terdidik (*being educated*).

Sementara itu, beberapa ahli memberikan definisi yang berbeda tentang pendidikan. Perbedaan definisi pendidikan masing – masing ahli tentu dipengaruhi disiplin ilmu dan pengalaman mereka. Namun demikian, pada semua definisi pendidikan terdapat titik temu satu sama lain. Adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Prof. Lodge

Pendidikan dalam arti luas, yakni seluruh peristiwa pendidikan mulai dari peristiwa

pendidikan yang dirancang secara terprogram hingga pendidikan yang berlangsung secara alami. Dalam pengertian yang sempit, pendidikan dibatasi pada fungsi tertentu di dalam masyarakat yang terdiri atas penyerahan adat istiadat (tradisi) dengan latar belakang sosialnya, pandangan hidup masyarakat itu kepada warga masyarakat generasi berikutnya.

2. Langeveld

Setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri.

3. John Dewey

Proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia.

4. Carter V. Good

- ❖ Seni, praktik, atau profesi sebagai pengajar
- ❖ Ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip dan metode

metode mengajar, pengawasan dan bimbingan murid dalam arti luas digantikan dengan istilah pendidikan

5. Brubacher

Pola perkembangan yang terorganisasi dan kelengkapan dari semua potensi manusiawi, moral, intelektual dan jasmani oleh dan untuk kepribadian individunya serta kegunaan masyarakatnya yang diarahkan demi menghimpun semua aktivitas tersebut bagi tujuan hidupnya.

6. Prof. Richey

Istilah pendidikan berkenaan dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu bangsa (masyarakat) terutama membawa warga masyarakat yang baru (generasi muda) bagi penunaian kewajiban dan tanggung jawabnya di dalam masyarakat. Jadi pendidikan adalah suatu proses yang lebih luas daripada proses yang berlangsung di dalam sekolah saja. Pendidikan adalah suatu aktivitas sosial yang esensial yang memungkinkan masyarakat

yang kompleks dan modern. Fungsi pendidikan ini mengalami proses spesialisasi dan melembaga dengan pendidikan formal, yang tetap berhubungan dengan proses pendidikan formal di luar sekolah.

7. Paulo Freire

Jalan menuju pembebasan yang permanen dan terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah masa di mana manusia menjadi sadar akan pembebasan mereka, yang melalui praksis mengubah keadaan itu. Tahap kedua dibangun atas tahap yang pertama, dan merupakan sebuah proses tindakan kultural yang membebaskan.

8. Ki Hajar Dewantara

Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

9. Driyakara

Pemanusiaan manusia muda atau pengangkatan manusia muda hingga akhirnya

bisa membudaya sendiri menjadi manusia purnawan.

10. Ahmad D. Marimba

Bimbingan atau pimpinan secara sadar yang dilakukan oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmaniah dan rohaniah si terdidik dalam upaya menuju terbentuknya kepribadian baik, utama dan terpuji.

11. Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari berbagai definisi yang telah dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwasanya hampir semua pengertian pendidikan tersebut melekat pada dua pandangan, yakni proses dan tujuan

pendidikan yang akan dicapai. Pendidikan dapat diartikan sebagai proses interaksi manusia dengan lingkungannya yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam rangka mengembangkan segala potensinya, baik jasmani maupun ruhani yang menimbulkan perubahan positif pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara terus menerus dan berkesinambungan guna mencapai tujuan hidupnya. Pendidikan bukan semata-mata sebagai sarana persiapan kehidupan mendatang, tetapi untuk kehidupan anak sekarang yang sedang mengalami perkembangan menuju ke tingkat kedewasaan.

B. Pendidikan Sebagai Ilmu

Istilah ilmu berasal dari kata *alima* (bahasa Arab) yang berarti pengetahuan. Di dalam bahasa Latin dikenal pula kata *scientia* yang juga berarti pengetahuan. Ada berbagai jenis pengetahuan, jenis pengetahuan dikelompokkan orang menjadi: *revealed knowledge*, *intuitive knowledge*, *rational knowledge*, *empirical knowledge*, dan *authoritative knowledge*; di pihak lain ada juga

yang mengelompokan jenis pengetahuan menjadi: *commonsense knowledge*, *scientific knowledge*, *philosophical knowledge*, dan *religious knowledge*. Secara etimologis ilmu adalah pengetahuan, karena itu semua pengetahuan tersebut di atas adalah ilmu.

Kaitannya terhadap pendidikan sebagai ilmu, Langeveld membedakan istilah pedagogik dan pedagogi. Pedagogik diartikan dengan ilmu mendidik, lebih menitikberatkan kepada pemikiran, perenungan tentang pendidikan. Suatu pemikiran bagaimana kita membimbing anak, mendidik anak. Berbeda dengan Langeveld, John Dewey justru tidak membedakan filsafat pendidikan dengan teori pendidikan, sebab itu dia mengatakan pendidikan adalah teori umum pendidikan. Sementara itu, menurut Driyarkara, ilmu pendidikan adalah pemikiran ilmiah tentang realitas yang kita sebut pendidikan (mendidik dan dididik). Pemikiran ilmiah tersebut bersifat kritis, metodis, dan sistematis. Menurut Barnadib, Ilmu pendidikan mempelajari suasana dan prose pendidikan. Dalam arti yang luas

paedagogi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari soal-soal yang timbul dalam praktik pendidikan. Demikian beberapa batasan tentang pengertian tentang ilmu pendidikan yang diberikan oleh para ahli, yang pada dasarnya sepakat bahwa yang dimaksud dengan ilmu pendidikan ialah ilmu pengetahuan yang membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan.

Suatu pengetahuan dapat berubah menjadi suatu ilmu apabila memenuhi persyaratan ilmu. Adapun syarat – syarat ilmu yang dimaksud secara umum adalah sebagai berikut:

1. Memiliki objek

Objek pendidikan ada dua macam, yaitu objek materi dan formal. Objek materi adalah materinya atau bendanya yang dikenai pendidikan, seperti peserta didik. Sedangkan objek formal adalah apa yang dibentuk (*to form*) oleh pendidikan, seperti banyak ilmu yang berkaitan dengan manusia, seperti sosiologi, psikologi, biologi yang berobjek materi sama yaitu manusia, namun objek

formalnya berbeda. Sosiologi memiliki objek formal kemasyarakatan, kejiwaan adalah objek formal psikologi, dan jasmaniah merupakan objek formal biologi.

2. Punya metode penyelidikan

Ilmu pendidikan memiliki metode penyelidikan yang sama dengan metode penyelidikan lainnya, yaitu memakai metode penelitian ilmiah.

3. Sistematis

Secara teoritik sistematika ilmu pendidikan dapat dibedakan menjadi 3 segi tinjauan, yaitu melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi, dengan melihat pendidikan sebagai upaya sadar, dengan melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi sekaligus upaya sadar dengan mengantisipasi perkembangan sosio-budaya di masa depan.

4. Dinamis

Ilmu pendidikan terus berupaya tumbuh dan berkembang sehingga tidak tergerus oleh perkembangan zaman.

5. Praktis

Dalam hal ini, ilmu pendidikan tidak diragukan lagi kebermanfaatannya karena dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari – hari.

6. Punya tujuan sendiri.

Ilmu pendidikan bertujuan untuk kesejahteraan manusia.

Setelah memahami persyaratan suatu ilmu pengetahuan, dapat diketahui bahwa ilmu pendidikan telah memenuhi persyaratan tersebut. Ilmu pendidikan memiliki objek kajian, metode, dan sistematika yang jelas. Selain itu, ilmu pendidikan juga memenuhi persyaratan lain, seperti praktis, dinamis, serta diabdikan bagi peningkatan kesejahteraan umat manusia.

C. Tujuan dan Fungsi Pendidikan

Tujuan pendidikan adalah suatu faktor yang amat sangat penting di dalam pendidikan, karena tujuan merupakan arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidikan. Begitu juga dengan penyelenggaraan pendidikan yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah tujuan yang hendak dicapainya. Proses pendidikan terjadi dengan

tujuan yang beragam. Masing – masing negara memiliki pandangan dalam tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Tujuan pendidikan di negara maju dan berkembangpun juga berbeda. Perbedaan tujuan pendidikan di berbagai negara bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti latar sosial – budaya, sistem politik yang berkembang, serta potensi alam masing – masing negara. Namun demikian, ada juga unsur kesamaannya.

UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) mencanangkan empat pilar pendidikan secara internasional baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, yakni:

1. Belajar untuk Mencari Tahu (*Learning to Know*)

Pilar pertama ini memiliki arti bahwa para peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya, melalui pengalaman-pengalaman. Hal ini akan dapat memicu munculnya sikap kritis dan semangat belajar peserta didik meningkat. *Learning to know* selalu mengajarkan tentang arti pentingnya sebuah

pengetahuan, karena didalam *learning to know* terdapat *learning how to learn*, artinya peserta didik belajar untuk memahami apa yang ada di sekitarnya, karena itu adalah proses belajar.

Selain itu, *learning to know* juga mengajarkan tentang *long life education* atau yang disebut dengan belajar sepanjang hayat. Arti pendidikan sepanjang hayat (*long life education*) adalah bahwa pendidikan tidak berhenti hingga individu menjadi dewasa, tetapi tetap berlanjut sepanjang hidupnya. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan di sekolah merupakan kelanjutan dalam keluarga. Sekolah merupakan lembaga tempat dimana terjadi proses sosialisasi yang kedua setelah keluarga, sehingga mempengaruhi pribadi anak dan perkembangan sosialnya. Sekolah diselenggarakan secara formal. Di sekolah anak akan belajar apa yang ada di dalam kehidupan, dengan kata lain sekolah harus mencerminkan kehidupan sekelilingnya. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh dipisahkan dari kehidupan

dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan budayanya.

2. Belajar untuk Mengerjakan (*Learning to Do*)

Pilar kedua menekankan pentingnya interaksi dan bertindak. Artinya, para peserta didik diajak untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya melalui sebuah tindakan nyata. Belajar untuk menerapkan ilmu yang didapat, bekerja sama dalam sebuah tim guna untuk memecahkan masalah dalam berbagai situasi dan kondisi. *Learning to do* berkaitan dengan kemampuan *hard skill* dan *soft skill*. *Soft skill* dan *hard skill* sangat penting dan dibutuhkan dalam dunia pendidikan, karena sesungguhnya pendidikan merupakan bagian terpenting dari proses penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, dan terampil dan siap untuk mengikuti tuntutan zaman.

Hard skill merupakan kemampuan yang harus menuntut fisik, artinya *hard skill* memfokuskan kepada penguasaan ilmu

pengetahuan, teknologi dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan kemampuan peserta didik. Penguasaan kemampuan hard skill dapat dilakukan dengan menerapkan apa yang dia dapatkan atau apa yang telah dipelajarinya di kehidupan sehari-hari, contohnya anak disekolah belajar tentang arti penting sikap disiplin, maka untuk memahami dan mengerti tentang disiplin itu, anak harus belajar untuk melakukan sikap disiplin, baik di rumah, disekolah atau dimanapun. Dengan begitu anak menjadi tahu dan faham tentang pentingnya sikap disiplin.

Selanjutnya adalah *soft skill*, artinya keterampilan yang menuntut intelektual. *Soft skill* merupakan istilah yang mengacu pada ciri-ciri kepribadian, kemampuan berbahasa dan pengoptimalan derajat seseorang. Jadi yang dimaksud dengan kemampuan *soft skill* adalah kepribadian dari masing-masing individu. *Soft skill* tidak diajarkan tetapi gurulah yang harus mencontohkan, seperti sikap tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Dengan

memberikan contoh tersebut, anak akan mencoba untuk menirukan apa yang dilihat. Hal itu merupakan bagian dari menumbuhkan kemampuan *soft skill*.

3. Belajar untuk Menjadi (*Learning to Be*)

Pilar ketiga artinya bahwa pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang peserta didik impikan dan cita-citakan. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan (*soft skill* dan *hard skill*) merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri (*learning to be*). Menjadi diri sendiri dapat diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Belajar untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat, belajar menjadi orang yang berhasil, sesungguhnya merupakan proses pencapaian aktualisasi diri.

Learning to be sangat erat kaitannya dengan bakat, minat, perkembangan fisik, kejiwaan anak serta kondisi lingkungannya. Misal: bagi siswa yang agresif, akan

menemukan jati dirinya bila diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi. Sebaliknya bagi siswa yang pasif, peran guru sebagai fasilitator bertugas sebagai penunjuk arah sekaligus menjadi mediator bagi peserta didik. Hal ini sangat diperlukan untuk menumbuhkan kembangkan potensi diri peserta didik secara utuh dan maksimal. Selain itu, pendidikan juga harus bermuara pada bagaimana peserta didik menjadi lebih manusiawi, menjadi manusia yang berperikemanusiaan.

4. Belajar untuk Hidup Bersama (*Learning to Live Together*)

Pilar terakhir artinya menanamkan kesadaran kepada para peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. jadi, mereka harus mampu hidup bersama. Dengan makin beragamnya etnis di Indonesia, kita perlu menanamkan sikap untuk dapat hidup bersama.

Pada pilar keempat ini, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu dikembangkan disekolah.

Dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, sebagai hasil dari proses pembelajaran, dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan di mana individu tersebut berada, dan sekaligus mampu menempatkan diri sesuai dengan perannya. Pemahaman tentang peran diri dan orang lain dalam kelompok belajar merupakan bekal dalam bersosialisasi di masyarakat (*learning to live together*). Untuk itu, pembelajaran di lembaga formal dan non formal harus diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemampuan intelektual dan profesional serta sikap dalam hal ini adalah kemampuan *hard skill* dan *soft skill*. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia yang demikian maka pada gilirannya akan menjadikan masyarakat Indonesia masyarakat yang bermartabat di mata masyarakat dunia.

Sementara itu, menurut Langeveld, ada enam macam tujuan pendidikan, yaitu:

1. Tujuan umum (total atau akhir), yaitu tujuan paling akhir dan merupakan keseluruhan

tujuan pendidikan, seperti membentuk manusia seutuhnya.

2. Tujuan khusus, yaitu penjabaran dari tujuan umum berdasarkan pertimbangan, seperti usia, jenis kelamin, tingkat inteligensi, bakat, minat, lingkungan sosial budaya, tahap-tahap perkembangan, tuntutan persyaratan pekerjaan dan sebagainya.
3. Tujuan tak lengkap, yaitu tujuan yang hanya berkaitan dengan sebagian aspek kehidupan manusia, misalnya aspek psikologis, sosiologis, dan lain-lain.
4. Tujuan sementara, yaitu tujuan yang bersifat sementara dan akan ditinggalkan setelah tercapai, kemudian digantikan dengan tujuan lain. Sebagai contoh: mengirim anak ke pesantren atau pondok agar anak memperoleh ilmu agama yang memadai; setelah tujuan tersebut tercapai, anak dapat kembali ke rumah.
5. Tujuan intermedier, yaitu tujuan antara yang berfungsi sebagai perantara untuk mencapai tujuan pokok lainnya. Misalnya: anak

dimasukkan dalam Pusat Latihan Kerja agar anak dapat belajar mandiri.

6. Tujuan insidental, yaitu tujuan yang dicapai pada situasi tertentu secara spontan dan seketika, misalnya mengajarkan cara makan yang sopan pada saat makan bersama.

Selanjutnya mengenai fungsi pendidikan, definisinya adalah serangkaian tugas atau misi yang diemban dan harus dilakukan oleh pendidikan. Tugas – tugas tersebut dapat berupa lingkup politik, ekonomi, sosial budaya, pembaruan, pembangunan, modernisasi, dsb sesuai dengan kepentingannya.

Fungsi pendidikan dalam arti mikro (sempit) ialah membantu (secara sadar) perkembangan jasmani dan rohani. Secara makro (luas), fungsi pendidikan adalah sebagai alat:

1. Bagi pengembangan dirinya sendiri, pendidikan berfungsi menyiapkan dirinya agar menjadi manusia secara utuh, sehingga ia dapat menunaikan tugas hidupnya secara baik dan dapat hidup wajar sebagai manusia.

2. Bagi pengembangan masyarakat, dibagi menjadi dua, yaitu fungsi preservatif dan direktif:

- a) Fungsi preservatif, untuk melestarikan tata sosial dan tata nilai yang ada dalam masyarakat.
- b) Fungsi direktif dilakukan oleh pendidikan sebagai agen pembaharuan sosial sehingga dapat mengantisipasi masa depan.

Selain itu pendidikan juga memiliki fungsi:

1. Menyiapkan sebagai manusia

Manusia muda yang belum sempurna, yang masih tumbuh dan berkembang, dipersiapkan ditumbuh kembangkan menjadi manusia, yaitu manusia seutuhnya. Manusia yang utuh mengandung arti utuh dalam potensi dan utuh dalam wawasan.

2. Menyiapkan tenaga kerja

Karena dalam hidupnya manusia pasti harus melakukan suatu karya demi hidupnya. Untuk dapat berkarya atau tegasnya tenaga kerja yang bekerja untuk mencari nafkah, maka ia harus disiapkan. Penyiapan manusia menjadi

tenaga kerja ini dilakukan melalui pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah.

3. Menyiapkan warga Negara yang baik

Maksudnya adalah agar manusia sebagai warga suatu negara menjadi warga negara yang baik, yang dapat melaksanakan semua kewajiban dan menyadari akan haknya secara baik. Melalui pendidikan dimaksudkan agar para warga negara ini menjadi patriotisme nasional.

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional di Indonesia sudah termaktub jelas dalam UU RI No. 20 Tahun 2003, Bab II Pasal 3 yakni sebagai berikut, “Pendidikan nasional **berfungsi** mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, **bertujuan** untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dan fungsi pendidikan disesuaikan dengan dimensi – dimensi kehidupan manusia dan motor penggerakanya adalah manusia sendiri yang memilih, merencanakan, menentukan, dan melaksanakan pilihannya guna mencapai tujuan hidup. Namun demikian, tujuan dan fungsi pendidikan secara umum yaitu mengembangkan potensi bawaan agar dapat berkembang optimal serta mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai manusia yang bermartabat dan berkepribadian guna mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.



Evaluasi (Diskusi Kelompok)

1. Ilmu pendidikan dikatakan telah memenuhi syarat sebagai suatu ilmu karena memiliki objek, metode, sistematika, bersifat dinamis, praktis, dan memiliki tujuan kemanusiaan. Analisislah peran ilmu pendidikan dalam membentuk sikap etis dan tanggung jawab akademik mahasiswa sebagai calon pendidik!

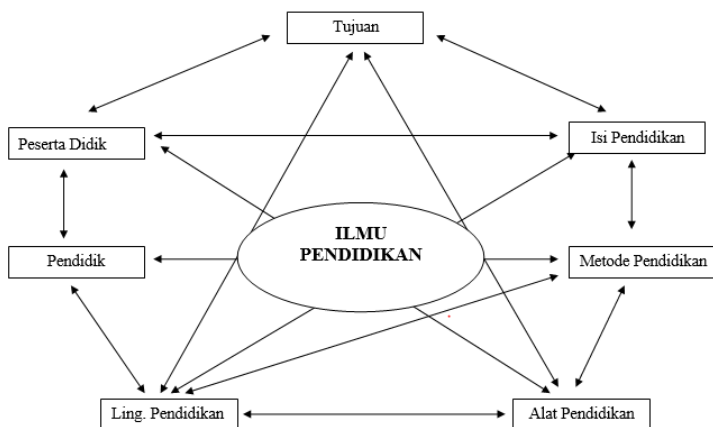
2. Diskusikan dengan teman anda mengenai urgensi pendidikan!

BAB 2

FAKTOR – FAKTOR PENDIDIKAN

Faktor pendidikan yaitu suatu tindakan/perbuatan atau situasi yang sengaja diadakan oleh orang dewasa atau pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan, tetapi berakibat anak sampai pada “hasil yang sama” dengan apa yang diharapkan atau sama dengan tujuan pendidikan. Berbagai unsur yang menunjang kedalam tujuan yang akan dicapai dalam pendidikan. Unsur-unsur tersebut penting fungsinya karena dapat menunjang dalam sebuah tujuan secara berkesinambungan dan sistematis.

Pendidikan sebagai sebuah sistem harus memiliki faktor – faktor tertentu yang diperlukan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Adapun faktor – faktor pendidikan yang dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut ini



Gambar 1. Faktor – Faktor Pendidikan

1. Tujuan

Setiap kegiatan apapun bentuk dan jenisnya sadar atau tidak sadar selalu diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Bagaimanapun segala sesuatu atau usaha yang tidak mempunyai tujuan tidak akan mempunyai arti apa-apa. Dengan demikian tujuan merupakan faktor yang sangat menentukan. Itulah sebabnya tujuan itu dibuat berjenjang seperti anak tangga. Untuk mencapai anak tangga paling atas, harus melalui anak tangga-anak tangga di bawahnya. Sebelum melaksanakan sebuah aktivitas, termasuk pendidikan, yang

pertama-tama harus ditetapkan adalah tujuan. Fungsi tujuan pendidikan adalah sebagai batas atau ukuran apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum. Secara singkat dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Fungsi tujuan bagi pendidikan sebagai berikut:

a. Sebagai arah pendidikan

Tanpa adanya semacam antisipasi (pandangan ke depan) kepada tujuan, penyelewengan akan banyak terjadi, demikian pula kegiatan-kegiatannya pun tidak akan efisien. Dalam hal ini tujuan akan menunjukkan arah dari suatu usaha. Sedangkan arah tadi menunjukkan jalan yang harus ditempuh dari situasi sekarang kepada situasi berikutnya.

b. Tujuan sebagai titik akhir

Suatu usaha tentu saja mengalami permulaan serta mengalami pula akhirnya. Mungkin saja ada usaha yang terhenti

dikarenakan suatu kegagalan mencapai tujuan, namun usaha itu belum bisa dikatakan telah berakhir. Pada umumnya, suatu usaha baru berakhir jika tujuan akhirnya telah tercapai.

- c. Tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain

Apabila tujuan merupakan titik akhir dari suatu usaha, maka dasar ini merupakan titik tolaknya, dalam arti bahwa dasar tersebut merupakan fundamen yang menjadi alas permulaan suatu usaha. Dengan demikian, antara dasar-dasar dan tujuan terbentanglah garis yang menunjukkan arah bergeraknya usaha tersebut, serta dasar dan tujuan pendidikan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain.

- d. Memberi nilai pada usaha yang dilakukan

Dalam konteks usaha-usaha yang dilakukan, kadang-kadang didapati tujuannya yang lebih luhur dan lebih mulia

dibandingkan yang lainnya. Semua itu terlihat apabila berdasarkan nilai-nilai tertentu.

2. Pendidik

Dalam hal ini kita dapat membedakan pendidikan itu menjadi 2 kategori, yaitu:

- a. Pendidik menurut kodrati, yaitu orang tua
- b. Pendidik menurut jabatan yaitu guru

Pendidik yang bersifat kodrati dan sebagai orang tua wajib pertama sekali memberikan pendidikan kepada anaknya, selain asuhan, kasih sayang, perhatian dan sebagainya. Kelahiran anak-anak dalam suatu keluarga, merubah status orang tua menjadi seorang pendidik karena kodrat. Dalam perspektif Islam, orang tua adalah pendidik yang paling bertanggung jawab. Seperti di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya : “Jagalah dirimu dan ahli familimu dari ancaman api neraka.” (Q.S At-Tahrim : 6)

Sedangkan pendidikan menurut jabatan, yaitu guru. Guru menjadi pendidik karena profesi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengartikan bahwa Guru adalah pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru adalah sebagai pendidik yang menerima tanggung jawab dari tiga pihak yaitu orang tua, masyarakat dan negara. Tanggung jawab

dari orang tua diterima guru atas kepercayaan yang mampu memberikan pendidikan dan pengajaran dan diharapkan pula dari pribadi guru dapat memancarkan sikap-sikap yang normatif baik, sebagai kelanjutan dari sikap dan sifat orang tua pada umumnya.

3. Peserta Didik

Istilah peserta didik mengandung makna yang lebih luas, mencakup anak yang belum dewasa, dan juga orang yang sudah dewasa, tetapi masih dalam taraf mencari atau menuntut ilmu dan keterampilan. Tanpa peserta didik, pendidikan tidak mungkin berjalan, sebab tidak ada gunanya guru tanpa peserta didik. Peserta didik sebagai manusia yang belum dewasa merasa tergantung kepada pendidiknya. Peserta didik merasa bahwa ia memiliki kekurangan-kekurangan tertentu, ia menyadari bahwa kemampuan masih sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan pendidiknya.

Peserta didik, selain sebagai objek pendidikan, juga sebagai subjek pendidikan. Anak bukanlah orang dewasa dalam ukuran kecil, melainkan suatu pribadi yang memiliki karakteristik secara individual yang berbeda dengan orang lain. Oleh karena itu, setiap anak mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri, dan membutuhkan perhatian dari pendidiknya.

Dalam proses pembelajaran, peserta didik harus menyadari hal-hal sebagai berikut:

- a. Belajar merupakan proses jiwa.
- b. Belajar menuntut konsentrasi.
- c. Belajar harus didasari sikap tawadhu'.
- d. Belajar bertukar pendapat hendaklah setelah mantap pengetahuan dasarnya.
- e. Belajar harus mengetahui nilai dan tujuan ilmu pengetahuan yang dipelajari.
- f. Belajar secara bertahap.
- g. Tujuan belajar adalah untuk berakhlak al-karimah.

4. Isi atau Materi Pendidikan

Isi pendidikan adalah segala sesuatu yang merupakan misi pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk keperluan pertumbuhan atau perkembangan jiwa dan raga peserta didik serta berguna sebagai modal bagi kehidupannya di masa depan definisi lain dari isi pendidikan adalah materi didik yang mampu mengantar anak didik menjadi dewasa yang susila atau manusia utuh yang berbudaya. Isi pendidikan tersebut berupa nilai-nilai yang tersusun sebagai sistem nilai. Dalam sistem persekolahan, materi pendidikan akan diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan.

Dalam usaha pendidikan yang diselenggarakan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat, ada syarat utama dalam pemilihan materi pendidikan yaitu;

- a. Materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan

- b. Materi harus sesuai dengan kemampuan peserta didik

Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, guru harus memilih bahan/materi yang perlu diberikan, dan bahan mana yang tidak perlu. Untuk itu guru harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

- a. Bahan/materi harus sesuai dan menunjang tercapainya tujuan. Hanya bahan/materi yang sesuai dan menunjang tujuan yang perlu diberikan.
- b. Urgensi bahan, yaitu bahan/materi itu penting untuk diketahui oleh peserta didik. Disamping itu sifat bahan tersebut merupakan landasan untuk mempelajari bahan berikutnya.
- c. Nilai praktis atau kegunaannya diartikan sebagai makna bahan itu bagi kehidupannya sehari-hari.
- d. Bahan tersebut merupakan bahan wajib, sesuai dengan tuntutan kurikulum.
- e. Bahan yang susah diperoleh sumbernya perlu diupayakan untuk diberikan oleh

guru. Untuk bahan yang mudah diperoleh sebaiknya ditugaskan untuk mempelajari, sedangkan guru hanya membicarakan pokok-pokoknya saja.

5. Metode atau Cara Pendidikan

Metode adalah cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dalam menentukan apakah metode dapat digunakan atau kurang tepat, ditentukan oleh beberapa faktor, yakni tujuan, peserta didik, isi, dan guru.

Adapun beberapa contoh metode yang dapat dipakai oleh para pendidik adalah sebagai berikut :

- a. Metode bercerita merupakan salah satu metode untuk mendidik anak. Berbagai nilai-nilai moral, pengetahuan dan sejarah dapat disampaikan dengan baik melalui bercerita. Cerita ilmiah maupun fiksi yang disukai oleh anak-anak dapat digunakan untuk menyampaikan pengetahuan.
- b. Metode diskusi yaitu dimana anak didik diberikan materi oleh pendidik untuk

dipresentasikan kemudian hasilnya akan didiskusikan dengan teman-teman dalam suatu kelas.

- c. Metode tanya jawab yaitu dimana pendidik memberikan kesempatan kepada anak didik untuk menanyakan apa yang tidak diketahui dalam materi pelajaran, agar pendidik tidak menyia-nyiakan waktu untuk menjelaskan padahal anak didik sudah mengetahui apa yang dijelaskan.
- d. Metode pemberian tugas yaitu pendidik memberikan tugas kepada anak didik dengan begitu pendidik dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dimiliki anak didik dalam materinya.
- e. Metode bermain. Bermain merupakan pekerjaan masa kanak-kanak dan cermin pertumbuhan anak. Bermain merupakan kegiatan yang memberikan kepuasan bagi diri sendiri. Melalui bermain anak memperoleh pembatasan dan memahami kehidupan.

6. Alat Pendidikan

Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu / yang diinginkan. Dalam pengertian yang luas, alat meliputi juga faktor-faktor yang lain, seperti tujuan, pendidik, anak didik, dan lingkungan pendidik bilamana faktor-faktor tersebut digunakan dan direncanakan dalam perbuatan atau tindakan mendidik.

Alat-alat pendidikan bermacam-macam, antara lain: hukuman dan ganjaran, perintah dan larangan, celana dan pujian, serta kebiasaan. Termasuk juga sebagai alat pendidikan diantaranya: keadaan gedung sekolah, keadaan perlengkapan sekolah, keadaan alat-alat pelajaran, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Ditinjau dari segi wujudnya, maka alat pendidikan itu berupa:

- a. Perbuatan pendidik (biasa disebut *software*), mencakup : nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, ancaman dan hukuman.

- b. Benda-benda lain alat bantu (biasa disebut hardware), mencakup : meja kursi belajar, papan tulis, penghapus, kapur tulis, buku, peta, LCD, proyektor, dan sebagainya.

Sementara itu, tindakan pendidikan yang merupakan alat pendidikan dapat ditinjau berdasarkan tiga sudut pandang berikut:

- a. Pengaruh tindakan terhadap tingkah laku anak didik
- b. Akibat tindakan terhadap perasaan anak didik
- c. Bersifat melindungi anak didik

Dalam hal penggunaan alat pendidikan, maka yang sangat penting diperhatikan adalah pribadi orang yang menggunakannya, sehingga penggunaan alat pendidikan tersebut tidak sekedar persoalan teknis belaka, namun lebih jauh justru menyangkut persoalan batin atau pribadi pendidik. Oleh karena itulah dalam memilih alat pendidikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: tujuan yang ingin dicapai, orang yang menggunakan alat, alat mana yang tersedia

dan dapat digunakan, serta untuk siapa alat itu digunakan.

7. Lingkungan Pendidikan

Lingkungan merupakan salah satu faktor pendidikan yang ikut serta menentukan corak pendidikan yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap peserta didik. Lingkungan dapat berupa lingkungan sosial dan lingkungan nonsosial. Lingkungan sosial berupa lingkungan yang terdiri atas manusia yang ada di sekitar anak yang dapat memberi pengaruh terhadap anak, baik sikap, perasaan, atau bahkan keyakinan agamanya, misalnya lingkungan pergaulan. Lingkungan nonsosial adalah lingkungan alam sekitar berupa benda atau situasi, misalnya keadaan ruangan, peralatan belajar, cuaca, dan sebagainya, yang dapat memberikan pengaruh pada peserta didik.

Pemahaman mengenai pengaruh lingkungan terhadap anak atau peserta didik merupakan keharusan bagi setiap pendidik, termasuk para guru. Dengan pemahaman ini,

para pendidik dapat memberikan penjelasan dan mempengaruhi anak secara lebih baik. Kurangnya pemahaman tentang lingkungan dan pengaruh yang ditimbulkannya, menyebabkan masyarakat selalu melemparkan tanggung jawab kepada sekolah dan guru jika terjadi hal-hal yang dianggapnya menyimpang atau tidak sesuai dengan keinginannya. Bukan tidak mustahil proses pendidikan berjalan sendiri-sendiri, bahkan kemungkinan saling bertabrakan satu dengan yang lainnya.

Di antara lingkungan yang banyak mempengaruhi peserta didik adalah lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat (dalam istilah Ki Hajar Dewantara disebut sebagai tri pusat pendidikan). Ketiga lingkungan ini, baik sebagai lingkungan sosial atau manusia, maupun nonsosial berupa benda-benda, situasi, iklim kehidupan, semuanya dapat membentuk watak, sikap, perilaku, kepribadian, kebiasaan peserta didik. Oleh karena itu, ketiga lingkungan

tersebut harus ditata sebaik mungkin sehingga dapat memberikan pengaruh yang positif bagi perkembangan peserta didik. Selain itu, ketiga lingkungan tersebut harus bersinergi dalam pendidikan untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal.



Evaluasi

1. Analisislah berbagai faktor pendidikan yang memengaruhi proses pendidikan, kemudian jelaskan bagaimana keterkaitan antar faktor tersebut dalam menentukan keberhasilan pendidikan.
2. Berdasarkan faktor-faktor pendidikan yang telah dipelajari, evaluasilah faktor pendidikan yang menurut Anda paling dominan dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini. Kemukakan argumen yang logis dan berbasis konsep, serta sertakan contoh pendukung.!

BAB 3

LEMBAGA - LEMBAGA PENDIDIKAN

Secara bahasa, lembaga adalah badan atau organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa lembaga adalah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau suatu usaha. Badan atau lembaga pendidikan adalah organisasi kelompok manusia yang karena satu dan lain hal memikul tanggung jawab pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan misi badan tersebut.

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian lembaga pendidikan sebagaimana berikut:

1. Umar Tirtarahardja dan La Sula

Menurut Umar Tirtarahardja dan La Sula, pengertian lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya pendidikan, khususnya pada tiga lingkungan utama

pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.

2. Enung K. Rukiyati dan Fenti Himawati

Menurut Enung K. Rukiyati dan Fenti Himawati, pengertian lembaga pendidikan adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang bersamaan dengan proses kebudayaan.

3. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati

Menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, pengertian lembaga pendidikan adalah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap peserta didik.

4. Hasbullah

Menurut Hasbullah, pengertian lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan yang meliputi pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Dari berbagai pengertian di atas, terdapat persamaan konsep mengenai lembaga pendidikan yakni tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi lembaga pendidikan merupakan suatu wadah yang menaungi dan memberi fasilitas yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi serta mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.

A. Bentuk – Bentuk Lembaga Pendidikan

1. Lembaga Pendidikan Formal

Dalam kehidupan sehari – hari, apabila menyebut nama pendidikan formal, persepsi kebanyakan orang adalah sekolah. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar mencakup SD/MI, pendidikan menengah mencakup SMP/MTs, pendidikan menengah mencakup SMA/SMK/MA, serta perguruan tinggi yang mencakup sekolah tinggi, institut, akademi, dan universitas.

Adapun ciri – ciri pendidikan formal, yaitu:

- a. Pendidikan yang berlangsung dalam ruang kelas yang sengaja dibuat oleh sebuah lembaga pendidikan formal.
 - b. Guru/Dosen merupakan orang yang telah ditetapkan secara resmi oleh lembaga.
 - c. Mempunyai administrasi dan manajemen yang jelas.
 - d. Adanya sebuah batasan usia sesuai dengan jenjang pendidikan.
 - e. Mempunyai kurikulum formal.
 - f. Adanya perencanaan, metode, media, serta evaluasi dalam sebuah pembelajaran.
 - g. Adanya sebuah batasan lama studi.
 - h. Kepada peserta didik yang lulus akan diberikan ijazah
 - i. Dapat meneruskan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi
2. Lembaga Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah pendidikan yang tidak terstruktur yang berkenaan dengan pengalaman sehari – hari yang tidak terencana dan tidak terorganisir (belajar

insidental). Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan yang dilaksanakan dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat yang terjadi secara alamiah disebut sebagai pendidikan informal. Selanjutnya, dalam pasal 27 disebutkan bahwa: (1) kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri; (2) hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan; (3) ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Adapun ciri – ciri pendidikan informal adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan belajar terbentuk secara mandiri.

- b. Tidak terikat dengan waktu dan tempat.
- c. Proses belajar berlangsung tanpa ada pendidik dan peserta didik, namun antara orangtua dengan anak atau antara kakak dengan adik.
- d. Tidak mengenal persyaratan usia.
- e. Tidak terdapat persyaratan khusus yang harus dilengkapi.
- f. Peserta didik tidak perlu mengikuti ujian tertentu.
- g. Proses pendidikan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan.
- h. Tidak ada kurikulum tertentu yang harus dijalankan.
- i. Tidak ada jenjang dalam proses pendidikannya.
- j. Proses pendidikan dilakukan secara terus menerus tanpa mengenal ruang dan waktu.
- k. Tidak terdapat manajemen yang jelas dalam proses pembelajaran.
- l. Tidak menggunakan metode yang komplikatif yang sulit di mengerti atau sulit dilaksanakan.

- m. Bahan pembelajaran cukup sederhana.
- n. Tidak terorganisasi secara struktural.

3. Lembaga Pendidikan Nonformal

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang dimaksud pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Dalam pasal 26 ayat (4) pada UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sisdiknas disebutkan bahwa satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis, ayat (5) kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/ atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Selain itu, tujuan pendidikan non-formal yakni untuk mengantisipasi masyarakat yang dengan berbagai alasan tidak dapat mengikuti pendidikan normal, misal karena faktor ekonomi, faktor demografi, faktor lingkungan, dan faktor orang tua. Seperti misalnya, saat ini, perkembangan zaman yang terus berkembang membuat gaya hidup juga mulai menyesuaikan dengan perkembangan, imbasnya yakni orang tua tak memiliki waktu yang banyak untuk memberikan pendidikan keluarga khususnya pada saat-saat usia balita (bawah lima tahun) atau batita (bawah tiga tahun) akhirnya pendidikan nonformal menjadi alternatif sebagai tempat untuk memberikan pendidikan anak usia dini.

Adapun ciri-ciri pendidikan nonformal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan berlangsung dalam lingkungan masyarakat.
- b. Guru adalah fasilitator yang diperlukan.
- c. Tidak adanya pembatasan usia.
- d. Materi pelajaran praktis disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis.
- e. Waktu pendidikan singkat dan padat materi.
- f. Memiliki manajemen yang terpadu dan terarah.
- g. Pembelajaran bertujuan membekali peserta dengan keterampilan khusus untuk persiapan diri dalam dunia kerja.

Berbagai contoh lembaga penyelenggaraan pendidikan nonformal antara lain;

- a. Kelompok Bermain (KB)
- b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- c. Taman Penitipan Anak (TPA)
- d. Lembaga khusus
- e. Sanggar

- f. Lembaga pelatihan
- g. Kelompok belajar
- h. Pusat kegiatan belajar masyarakat
- i. Majelis taklim
- j. Lembaga Ketrampilan dan Pelatihan

B. Fungsi Lembaga Pendidikan

Keberadaan lembaga pendidikan memiliki fungsi dan peranan yang sangat berarti bagi masyarakat di suatu negara. Selain mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung, lembaga pendidikan juga mengajarkan peserta didik tentang kemandirian, kemampuan berprestasi, pengembangan kepribadian, dan spesifikasi. Oleh karena itu, lembaga pendidikan memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik, baik di keluarga, sekolah, maupun lingkungan.
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan dan kurikulum yang berlaku.

3. Membina kerjasama yang baik antara orang tua, serta masyarakat.

Sementara itu, fungsi dan peranan lembaga pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi ini dilaksanakan melalui berbagai program dan kurikulum pendidikan baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat sehingga transmisi nilai-nilai budaya dapat selaras dengan pendidikan lainnya.

2. Fungsi Pengendalian Sosial

Lembaga pendidikan juga berperan dalam hal kontrol sosial dengan cara menanamkan nilai-nilai, norma, dan loyalitas tatanan tradisional kepada para peserta didik. Dengan adanya fungsi kontrol sosial ini maka diharapkan para peserta didik memiliki karakter yang berkualitas sehingga tatanan masyarakat yang harmonis dapat terwujud.

3. Fungsi Melestarikan Budaya

Kelestarian budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam tentunya harus

dilestarikan. Dalam hal ini, lembaga pendidikan punya peranan penting dalam mengajarkan keanekaragaman budaya nasional tersebut kepada para peserta didik.

4. Fungsi Seleksi, Pelatihan, dan Pengembangan Manusia

Lembaga pendidikan juga memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam proses seleksi, pelatihan, dan mengembangkan individu yang berkualitas bagi dunia kerja dan dunia bisnis. Salah satu contohnya adalah pada saat proses masuk perguruan tinggi yang mengharuskan peserta didik mengikuti ujian. Peserta didik yang lulus seleksi ujian kemudian akan menerima pendidikan, dilatih dan digembleng agar menjadi individu yang berkualitas.

5. Fungsi Perubahan Sosial

Dengan adanya lembaga pendidikan dan segala kegiatannya, maka hal tersebut akan mempengaruhi kehidupan sosial secara umum. Hal ini terjadi karena nilai-nilai,

keyakinan, norma, dan pola pikir yang telah ditanamkan kepada para peserta didik yang membentuk kepribadiannya sehingga mempengaruhi tingkah lakunya di masyarakat.



Evaluasi

1. Analisislah peran tiga lembaga pendidikan di Indonesia dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Jelaskan fungsi masing-masing lembaga serta kontribusinya dalam proses pendidikan peserta didik
2. Menurut anda, bagaimana pengaruh timbal balik ketiga lembaga pendidikan tersebut?Jelaskan!

BAB 4

PENDIDIKAN SEBAGAI SISTEM

Sistem berasal dari bahasa Yunani, yakni *systema* yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Istilah sistem merupakan suatu konsep yang bersifat abstrak. Sistem dapat diartikan sebagai seperangkat komponen atau unsur – unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai satu tujuan.

Banyak ahli yang berpendapat mengenai definisi sistem, yakni:

1. McAhsan

Suatu strategi yang menyeluruh atau terencana dikomposisi oleh suatu sel elemen yang harmonis, merepresentasikan kesatuan unit, masing-masing mempunyai tujuan sendiri yang semuanya berkaitan urut dalam bentuk yang logis.

2. Immegart

Suatu keseluruhan yang memiliki bagian-bagian yang tersusun secara sistematis, bagian-bagian itu berelasi antara yang satu dengan yang lain, serta peduli terhadap konteks lingkungannya.

3. John McManama

Struktur konseptual yang tersusun dari fungsi - fungsi yang saling berhubungan yang bekerja sebagai satu kesatuan organik untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien.

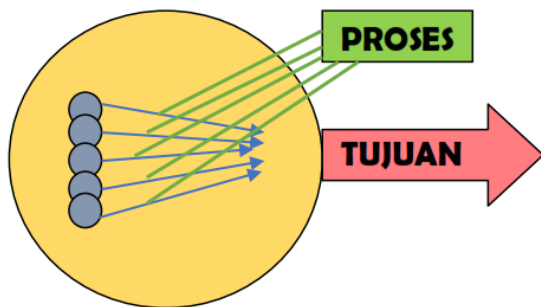
4. Zahara Idris

Suatu kesatuan yang terdiri dari komponen - komponen atau elemen - elemen atau unsur - unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekadar acak, yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil (produk).

Dari berbagai pendapat yang diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa definisi sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari

berbagai komponen yang memiliki hubungan fungsional serta saling terkait untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, semua komponen itu saling berinteraksi dan saling mempengaruhi hingga membentuk sebuah sistem. Lebih ringkasnya, dalam sistem terdapat karakteristik sebagaimana berikut:

1. Adanya satu kesatuan yang holistik
2. Adanya komponen – komponen
3. Berfungsinya komponen – komponen secara teratur
4. Adanya keterkaitan di antara semua komponen
5. Adanya tujuan yang akan dicapai



Gambar 2. Komponen – Komponen Sistem

A. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Sebagai Sistem

Sebagaimana telah dikemukakan, pendidikan dikatakan sebagai sistem terbuka karena tidak mungkin sebuah sistem pendidikan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik apabila pendidikan itu tidak menjalin hubungan dengan lingkungannya (supra sistemnya) terlebih lagi bila jika pendidikan itu mengisolasi diri dari lingkungannya. Pendidikan itu ada di tengah-tengah masyarakat dan ia adalah milik masyarakat. Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah/sekolah, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena keberadaan pendidikan yang seperti itu maka apa yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat akan berpengaruh pula terhadap pendidikan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Filsafat negara
2. Agama
3. Sosial
4. Budaya

5. Ekonomi
6. Politik
7. Demografi

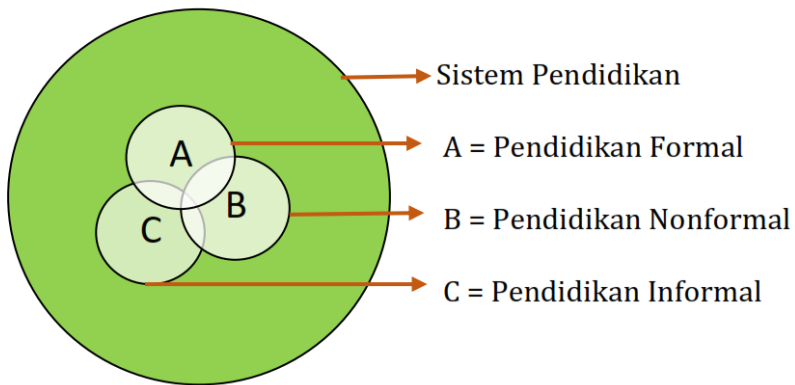
Ketujuh faktor tersebut merupakan supra sistem dari sistem pendidikan. Pendidikan sebagai suatu sistem berada bersama, terikat, dan berada dalam tekanan supra sistemnya. Pendidikan tidak mungkin selalu mendahului gerak ketujuh sistem yang berada di lingkungannya. Namun demikian, jika pendidikan hanya menyesuaikan diri atau menjadi pengikut setia dari supra sistem atau faktor-faktor tersebut maka pendidikan akan selalu berada di belakang tanpa kreativitas dan tanpa inisiatif apapun. Oleh karena itu, di samping mengikuti kemauan atau tekanan faktor-faktor yang ada dalam lingkungannya, pendidikan hendaknya dapat melakukan antisipasi terhadap arah gerak faktor-faktor luar atau supra sistemnya. Antisipasi ini dapat menjadi dasar untuk mengadakan pembaharuan di dalam tubuh pendidikan itu sendiri. Dengan demikian pendidikan tampak memiliki kreasi dan inisiatif

yang bisa ditunjukkan kepada faktor-faktor luar (supra sistemnya) dan sekaligus dapat berfungsi sebagai mercusuar terhadap lingkungannya sehingga pendidikan dapat menjadi penerang, contoh, dan teladan bagi lingkungannya.

B. Lembaga Pendidikan Sebagai Suatu Sistem

Sebuah sistem memiliki struktur yang teratur. Sistem memiliki beberapa sub sistem, sub sistem dapat terdiri dari beberapa sub – sub - sistem, sub – sub -sistem dapat memiliki sub – sub – sub - sistem, dan seterusnya hingga sampai pada bagian yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut komponen atau elemen.

Dalam konteks pendidikan yang lebih luas, pendidikan adalah suatu sistem. Sementara subsistemnya adalah pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Tetapi, pada suatu saat sub – sistem bisa menjadi sistem sendiri. Maka bisa jadi pendidikan nonformal menjadi sistem pendidikan tersendiri. Perhatikan gambar berikut:



Gambar 3. Sistem dan Sub Sistem Pendidikan

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal adalah sebagai sub sistem pendidikan. Ketiga sub sistem pendidikan itu bertugas sesuai dengan peran masing – masing. Namun, saling terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan sistem pendidikan. Jika salah satu sub sistem tidak melaksanakan tugas dengan baik, akan mengganggu bekerjanya sistem, bahkan bisa mengganggu bekerjanya sub sistem lain.

Dari gambar di atas, dapat dipahami bahwa seluruh sub sistem diperlukan untuk mencapai

tujuan sistem pendidikan. Tidak ada di antara ketiga sub sistem yang dipandang paling baik dan paling berperan. Oleh sebab itu, jika kita memahami ada masalah pendidikan, berarti menyangkut tugas dari semua sub sistem itu. Pendidikan itu bukan hanya pendidikan formal, melainkan juga informal dan nonformal. Oleh sebab itu, jika kita memahami bahwa kualitas pendidikan suatu bangsa rendah, seluruh sub sistem tersebut sama – sama meningkatkan kinerjanya dan mempererat keterkaitan di antara ketiga sub sistem tersebut.

Sebagai contoh yang lainnya apabila proses belajar dan pembelajaran dipandang sebagai suatu sistem, maka akan memiliki subsistem-subsistem sebagai berikut:

1. Sub sistem materi pembelajaran
2. Sub sistem metode pembelajaran
3. Sub sistem alat dan media pembelajaran
4. Sub sistem lingkungan pembelajaran
5. Sub sistem manajemen dan administrasi kelas
6. Sub sistem peserta didik/mahasiswa

7. Sub sistem pendidik
8. Sub sistem pengawas atau supervisor
9. Sub sistem evaluasi dan umpan balik

C. Tujuan Pendidikan Sebagai Sistem

Pendidikan sebagai suatu sistem dapat ditinjau dari dua hal sebagai berikut.

1. Sistem Pendidikan Secara Mikro

Sistem pendidikan secara mikro polanya lebih merupakan sebagai upaya mencerdaskan peserta didik melalui proses interaksi dan komunikasi, yaitu pesan yang akan disampaikan dalam bentuk bahan belajar. Sistem pendidikan secara mikro dapat dilihat pada beberapa komponen pokok, yaitu:

- a. Tujuan
- b. Bahan
- c. Pendidik
- d. Peserta didik
- e. Proses
- f. Hasil
- g. Balikan

2. Sistem Pendidikan Secara Makro

Sistem pendidikan secara makro menyangkut berbagai hal atau komponen yang lebih luas sebagaimana gambar berikut:



Gambar 4. Sistem Pendidikan Secara Makro

a. Masukan (*Input*), ada empat jenis pendidikan, yaitu:

- 1) Sistem nilai dan pengetahuan, misalnya falsafah negara, tujuan pendidikan nasional, dan sebagainya.
- 2) Sumber daya manusia, termasuk di dalamnya masyarakat, peserta didik, pendidik, dan sebagainya.
- 3) Masukan instrumental seperti, perangkat kurikulum, panduan, dan silabus.
- 4) Masukan sarana termasuk di dalamnya fasilitas dan sarana pendidikan yang harus disiapkan

- b. Proses, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan proses belajar mengajar atau proses pembelajaran di sekolah ataupun di luar sekolah, dalam komponen proses ini termasuk di dalamnya kegiatan belajar dengan segala dinamika dan unsur yang mempengaruhinya, serta kegiatan pembelajaran yang dilakukan pendidik dalam rangka memberi kemudahan kepada peserta didik untuk terjadinya proses pembelajaran.
- c. Keluaran (*Output*), hasil yang diperoleh pendidikan bukan hanya terbentuknya pribadi lulusan atau peserta didik yang memiliki pengetahuan, sikap dan ketrampilan sesuai dengan yang diharapkan dalam tujuan yang ingin dicapai.



Evaluasi

1. Sebutkan komponen – komponen dalam suatu sistem!
2. Pendidikan dipandang sebagai suatu sistem yang memiliki tujuan tertentu. Jelaskan dan analisislah dua tujuan utama pendidikan sebagai sistem, serta kaitkan dengan praktik penyelenggaraan pendidikan!
3. Identifikasilah dan analisislah satu contoh sistem yang berkaitan dengan pendidikan (misalnya sekolah atau perguruan tinggi), kemudian uraikan subsistem-subsistemnya serta jelaskan hubungan dan peran masing-masing subsistem dalam mencapai tujuan pendidikan.

BAB 5

LANDASAN – LANDASAN KEPENDIDIKAN

Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar atau alas, karena itu landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material dapat pula bersifat konseptual. Berdasarkan sifat wujudnya terdapat dua jenis landasan:

1. Landasan yang bersifat material, seperti landasan pacu pesawat terbang dan pondasi bangunan gedung.
2. Landasan yang bersifat konseptual, seperti dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.

Istilah pendidikan dalam bahasa Inggris adalah *education* berasal dari kata *to educate*, yaitu mengasuh, mendidik. Dalam *dictionary of education*, *education* adalah kumpulan semua proses yang memungkinkan seseorang

mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku yang bernilai positif di dalam masyarakat. Istilah *education* juga bermakna proses sosial tatkala seseorang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpiih dan terkontrol (khususnya lingkungan sosial) sehingga mereka dapat memiliki kemampuan sosial dan perkembangan individual secara optimal.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah alas ataupun dapat diartikan sebagai fondasi, dasar, pedoman dan sumber - sumber dalam mencapai suatu rangkaian kegiatan menuju pendewasaan guna menuju kehidupan yang lebih berarti.

A. Macam – Macam Landasan Pendidikan

1. Landasan Religius

Landasan religius adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Landasan religius dalam pendidikan dapat bersumber dari:

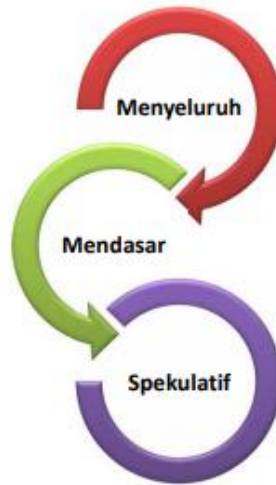
a. Al-Quran

b. Hadits

c. Ijtihad

2. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis (filsafat) merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakekat pendidikan. Hakekat belajar itu sendiri adalah usaha mewujudkan suasana belajar agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam dirinya, termasuk keterampilan yang ia miliki. Terdapat kaitan yang erat antara pendidikan dengan filsafat, karena filsafat mencoba untuk merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat, sedangkan pendidikan berupaya menjawab secara kritis dan mendasar berbagai pertanyaan pokok sekitar pendidikan.



Gambar 5. Karakter berfikir

filsafat

Peranan filsafat dalam bidang pendidikan tersebut berkaitan dengan hasil kajian antara lain tentang:

- a. Keberadaan dan kedudukan manusia sebagai makhluk di dunia ini.
- b. Masyarakat dan kebudayaannya.
- c. Keterbatasan manusia sebagai makhluk hidup yang banyak mengalami tantangan.
- d. Perlunya landasan pemikiran dalam pekerjaan pendidikan.

Pendidikan lahir dari induknya yaitu filsafat. Pada awalnya pendidikan berada

bersama dengan filsafat, sebab filsafat tidak pernah bisa membebaskan diri dengan pembentukan manusia.

Ada empat macam fungsi filsafat sebagai landasan pendidikan, yakni sebagai berikut:

a. Spekulatif

Berusaha mengerti keseluruhan persoalan-persoalan pendidikan dan antar hubungannya dengan faktor lain

b. Normatif

Sebagai penentu arah, pedoman untuk apa pendidikan itu, khususnya norma moral yang bagaimana sebaiknya yang menjadi cita-cita manusia.

c. Kritik

Dasar bagi pengertian kritis rasional dalam pertimbangan dan penafsiran data-data ilmiah

d. Teori dan Praktik

Dasar bagi pelaksanaan pendidikan yang dilakukan bagi seorang pendidik.

Praktik pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau

lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan.

3. Landasan Psikologis

Landasan psikologi adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari studi ilmiah dalam bidang psikologi yang menjadi sandaran, tumpuan atau titik tolak studi dan praktek pendidikan Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan.

Dalam perjalanan hidupnya setiap individu mengalami perkembangan, yaitu perubahan-perubahan yang teratur sejak dari kecil hingga dewasa. Berdasarkan perkembangan individu, tenaga kependidikan memerlukan ilmu pendidikan yang cocok dengan tingkat perkembangan usia.

Belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman dan bisa melaksanakan pada pengetahuan yang lain serta mampu mengkomunikasikan

kepada orang lain. Dalam psikologi belajar ada sejumlah teori belajar, diantaranya:

- a. Teori klasik, disiplin mental bermanfaat untuk menghafal perkalian dan melatih soal-soal.
- b. Teori behavioris bermanfaat untuk membentuk perilaku yang nyata seperti mau menyumbang, giat bekerja, gemar menyanyi, dan sebagainya.
- c. Teori kognisi, cocok untuk mempelajari materi-materi pelajaran yang lebih rumit yang membutuhkan pemahaman untuk memecahkan masalah dan untuk berekreasi menciptakan sesuatu bentuk atau ide baru.

4. Landasan Historis

Sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang penuh akan informasi-informasi yang sangat berharga. Informasi-informasi ini merupakan warisan untuk generasi muda dari generasi pendahulunya. Pendidikan di Indonesia sudah ada sebelum negara Indonesia berdiri dikarenakan sejarah

pendidikan sudah berlangsung cukup lama. Pendidikan di Indonesia sudah ada sejak zaman Hindu-Budha hingga pasca kemerdekaan. Semangat dari berbagai organisasi berkeinginan untuk memajukan pendidikan, yang dipelopori oleh organisasi Budi Utomo, Sarekat Dagang dan Partai Politik yang member inspirasi untuk mendirikan sekolah - sekolah.

Praktek-praktek pendidikan masa lampau Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga tonggak sejarah, yaitu:

a. Pendidikan Tradisional

Penyelenggaraan pendidikan di nusantara yang dipengaruhi oleh agama-agama besar di dunia Hindu, Budha, Islam dan Nasrani (Katolik dan Protestan). Pada zaman dahulu, pendidikan merupakan salah satu cara untuk menyebarkan ajaran agama dan keyakinan. Untuk itu tokoh agama seperti para walisongo menggunakan cara pendidikan dalam menyebarkan agama Islam melalui pondok

pesantren, meskipun pada awalnya hanya sedikit yang menjadi pengikutnya, namun seiring dengan berjalannya waktu banyak orang yang tertarik untuk belajar apalagi strategi yang digunakan dalam pendidikan zaman dahulu diakulturasikan dengan kebudayaan lokal. Dengan ini menunjukkan bahwa pendidikan sudah ada pada zaman dahulu.

b. Pendidikan Kolonial Barat

Penyelenggaraan pendidikan di nusantara yang dipengaruhi oleh pemerintahan kolonial barat, terutama kolonial Belanda. Pada zaman penjajahan, Belanda menjajah Indonesia kurang lebih 3,5 abad. Dengan adanya penjajahan ini secara tidak sadar bangsa Indonesia juga mendapatkan pendidikan. Sebagai contoh ketika seorang anak ingin masuk ke sekolah Belanda maka anak tersebut harus dituntut untuk bisa berbahasa Belanda. Bahkan sistem pembelajarannya pun mengarah pada sistem pembelajaran yang

ada di Belanda. Selain itu, pada masa pendudukan belanda banyak para tokoh nasional yang mereka bukan serta merta lulusan dari dalam negeri saja, melainkan banyak dari mereka yang lulusan dari luar negeri.

c. Pendidikan Kolonial Jepang

Penyelenggaraan pendidikan di nusantara yang dipengaruhi oleh pemerintahan kolonial Jepang dalam zaman perang dunia II. Negara Jepang juga pernah menjajah bangsa Indonesia. Tujuan utamanya menjajah bangsa Indonesia adalah untuk mencari kekuatan demi melawan para sekutu dengan cara memberikan pendidikan militer bagi rakyat Indonesia, di sini dapat dilihat bahwa secara tidak langsung mereka memperoleh pendidikan mereka diajari tentang cara melawan musuh, mempertahankan diri, dan lain sebagainya. Namun pada akhirnya rencana Jepang tidak berjalan sesuai dengan apa yang

diingkan oleh Jepang. Tugas pendidikan sebagian untuk membentuk mental dan moral serta sebagian lagi untuk membentuk pengetahuan dan keterampilan.

5. Landasan Sosiologis Budaya

Individu maupun masyarakat sebagai suatu kesatuan individu-individu mempunyai berbagai kebutuhan. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut masyarakat membangun atau mempunyai pranata sosial. Salah satu diantaranya adalah pranata pendidikan. Pendidikan merupakan pranata sosial yang berfungsi melaksanakan sosialisasi atau enkulturasi. Pendidikan adalah sesuatu proses membuat orang kemasukan budaya, membuat orang berperilaku mengikuti budaya yang masuk pada dirinya.

Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat:

- a. Kekeluargaan dan gotong royong;
- b. Kebersamaan, musyawarah untuk mufakat;
- c. Kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat;
- d. Negara melindungi warga negaranya; dan
- e. Selaras serasi seimbang antara hak dan kewajiban.

6. Landasan Yuridis (Hukum)

Landasan yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangundangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan.

Dasar pendidikan nasional dalam UUD 1945 tersurat pada ke lima sila yang di sebut pancasila. Karena pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, implikasinya maka dasar pendidikan nasional indonesia adalah pancasila. Dalam pembukaan UUD 1945 di dalamnya telah tersirat cita-cita pendidikan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan

bangsa. Selanjutnya pasal 31 UUD 1945 secara tersurat menyatakan bahwa :

- a. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- c. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang di atur dengan undang-undang.
- d. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Akar pendidikan nasional pada dasarnya merupakan usaha kultural dengan maksud mempertinggi kualitas hidup dan kehidupan manusia baik secara individual, kelompok

masyarakat maupun sebagai suatu bangsa. Pendidikan harus di kembangkan dengan berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan masyarakat atau bangsa yang bersangkutan. Secara yuridis, pada pasal 1 ayat 2 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional di tegaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pembukaan UUD 1945 menyatakan Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia, serta pasal 29 undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa “(1) negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa”; dan (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

Definisi pendidikan, fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (pasal 1 UU RI No. 20 Tahun 2003).

Fungsi pendidikan nasional adalah “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

7. Landasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Pendidikan

Kebutuhan pendidikan yang mendesak cenderung memaksa tenaga pendidik untuk mengadopsi berbagai bidang teknologi ke dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan haruslah mendapat perhatian yang proporsional dalam bahan ajaran. Dengan demikian pendidikan bukan hanya berperan dalam pewarisan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) tetapi juga ikut menyiapkan manusia yang sadar IPTEK dan calon pakar IPTEK itu. Selanjutnya pendidikan akan dapat mewujudkan fungsinya dalam pelestarian dan pengembangan IPTEK tersebut.

Manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, diantaranya:

- a. Memberikan kesejahteraan lahir dan batin setinggi-tingginya

- b. Mendorong pemanfaatan pengembangan sesuai tuntutan zaman
- c. Menjamin penggunaannya secara bertanggung jawab
- d. Memberi dukungan nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa
- e. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- f. Meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas sumber daya manusia.

B. Tujuan Landasan Pendidikan

Tujuan pendidikan sama dengan tujuan hidup individu, tidak ditentukan oleh orang lain, Pendidikan berlangsung kapanpun, artinya berlangsung sepanjang hayat (*long life education*). Karena itu pendidikan berlangsung dalam konteks hubungan individu yang bersifat multi dimensi, baik dalam hubunganindividu dengan Tuhannya, sesama manusia, alam, bahkan dengan dirinya sendiri. Dalam hubungan yang bersifat multi dimensi itu, pendidikan berlangsung melalui berbagai bentuk kegiatan, tindakan, dan kejadian, baik yang pada awalnya

disengaja untuk pendidikan maupun yang tidak disengaja untuk pendidikan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya hakikat pendidikan adalah humanisasi yang menginginkan terwujudnya manusia ideal atau manusia yang dicita citakan sesuai nilai nilai dan norma yang dianut. Contoh manusia ideal yang menjadi tujuan pendidikan tersebut antara lain: manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas dan terampil. Oleh karena itu pendidikan bersifat normatif harus dapat dipertanggung jawabkan. Mengingat hal tersebut pendidikan tidak boleh dilaksanakan secara sembarang, melainkan harus dilaksanakan dengan bijaksana. Pendidikan harus dilaksanakan secara disadari dengan mengacu kepada suatu landasan yang kokoh, sehingga jelas tujuannya tepat isi kurikulumnya serta efisien dan efektif cara pelaksanaannya.

C. Fungsi Landasan Pendidikan

Pendidikan yang diselenggarakan dengan suatu landasan yang kokoh, maka prakteknya

akan mantap, benar dan baik, relatif tidak akan terjadi kesalahan kesalahan yang dapat merugikan sehingga praktek pendidikan menjadi efisien, efektif, dan relevan dengan kebutuhan individu, masyarakat dan pembangunan.

Sebagai contoh dalam praktek pendidikan para guru dituntut agar melaksanakan peranan sesuai semboyan "*Tut Wuri Handayani*". Untuk itu para guru idealnya memahami dan meyakini asumsi-asumsi dari semboyan tersebut. Sebab apabila tidak sekalipun tampaknya guru tertentu berbuat seperti melaksanakan peranan sesuai semboyan Tut Wuri Handayani, namun perbuatan itu tidak akan disadarinya sebagai perbuatan untuk tut wuri handayani untuk peserta didiknya. Bahkan kemungkinan perbuatan guru tersebut akan lebih sering bertentangan dengan semboyan tersebut. Misalnya: guru kurang menghargai bakat masing masing peserta didik ; semua peserta didik dipandang sama, tidak memiliki perbedaan individu ; guru lebih sering mengatur apa yang diperbuat peserta didik dalam rangka belajar,

guru tidak menghargai kebebasan peserta didik. Seharusnya guru berperan sebagai penentu perkembangan pribadi peserta didik, guru berperan sebagai pembentuk pribadi peserta didik, guru berperan sebagai pembentuk untuk menjadi siapa para peserta didik dikemudian hari. Dalam contoh ini semboyan tinggal hanya sebagai semboyan. Sekalipun guru itu hafal betul semboyan tersebut, tetapi jika asumsi asumsinya tidak dipahami dan diyakini maka perbuatan dalam praktek pendidikannya tetap tidak bertitik tolak pada semboyan tadi, terjadi kesalahan, sehingga tidak efisien dan tidak efektif. Sebaliknya, jika guru memahami dan meyakini asumsi dari semboyan *Tut Wuri Handayani* (Yaitu : Kodrat alam dan kebebasan peserta didik) maka ia akan dengan sadar melaksanakan peranannya. Guru akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengatur diri mereka sendiri dalam rangka belajar, guru menghargai kebebasan peserta didik. Dengan bertitik tolak pada asumsi pada kodrat alam dan kebebasan yang dimiliki setiap peserta didik.

Maka perbuatan guru dalam praktek pendidikannya bukan untuk membentuk prestasi belajar tanpa mempertimbangkan bakat atau kecepatan dan kapasitas belajar masing masing peserta didik. Guru hanya akan mengatur atau mengarahkan peserta didik ketika peserta didik melakukan kesalahan atau salah arah dalam rangka belajarnya. Berdasarkan uraian di atas, jelas kiranya bahwa asumsi atau landasan pendidikan akan berfungsi sebagai titik tolak atau tumpuan bagi para guru dalam melaksanakan praktek pendidikan.



Evaluasi

1. Buatlah peta konsep tentang landasan pendidikan sebagaimana yang diuraikan di atas!
2. Analisislah konsep landasan pendidikan dengan merumuskan pengertiannya secara konseptual, kemudian jelaskan mengapa landasan pendidikan menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan pendidikan!

3. Jelaskan fungsi landasan pendidikan bagi tenaga pendidik!

BAB 6

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini sistem pendidikan nasional merupakan suatu supra sistem, yakni sistem yang besar dan kompleks yang di dalamnya mencakup bagian yang juga merupakan sistem – sistem.

Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 3, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sisdiknas dirumuskan dengan misi utama dapat memberi pendidikan dasar bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Hal ini bertujuan supaya tiap-tiap warga negara memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar.

Kemampuan dasar tersebut meliputi kemampuan membaca, menulis, dan berhitung serta mampu menggunakan bahasa Indonesia yang diperlukan oleh setiap warga negara untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sisdiknas memberikan kesempatan belajar yang seluas - luasnya kepada setiap warga negara. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi: "Tiap - tiap warga negara berhak mendapat pengajaran." Oleh karena itu, perlakuan yang berbeda terhadap peserta didik tidak dibenarkan. Perbedaan atas dasar jenis kelamin, agama, ras, suku, latar belakang sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi merupakan hal yang dilarang. Akan tetapi, hal tersebut dapat terjadi kecuali apabila ada satuan atau kegiatan pendidikan yang memiliki kekhususan yang harus diindahkan.

Sisdiknas diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta dibawah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri lainnya, seperti pendidikan agama oleh Menteri

Agama, AKABRI oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan. Selain itu, beberapa departemen lainnya juga menyelenggarakan pendidikan yang disebut pendidikan dan pelatihan (diklat). Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilaksanakan melalui bentuk - bentuk kelembagaan beserta program-programnya.

A. Dasar dan Tujuan Pendidikan Nasional

Dasar dan tujuan pendidikan adalah sesuatu yang sangat fundamental dalam pelaksanaan pendidikan karena dasar pendidikan akan menentukan corak dan isi pendidikan. Sedangkan tujuan pendidikan akan menentukan ke arah mana peserta didik akan dibawa.

Pada Pasal 1 ayat (2) UU No 2 Tahun 1989, ditegaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka pendidikan nasional pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan yang telah ada sebelumnya dan merupakan warisan budaya bangsa secara turun temurun.

Dengan demikian, pendidikan nasional merupakan pengembangan secara terpadu sistem pendidikan yang bersifat dualistik yang sebelumnya menjadi satu pendidikan nasional. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan pula dalam pasal 1 ayat (3): “Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.” Satuan pendidikan yang dimaksudkan adalah penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah. Jadi, dalam hal ini, semua satuan pendidikan yang ada, bisa masuk dalam satu sistem pendidikan nasional, sepanjang memenuhi persyaratan, terutama yang menyangkut dasar, fungsi, dan tujuannya.

Sementara itu, dalam Pasal 2 UU No 2 Tahun 1989 tersebut disebutkan pula bahwa: “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.” Dengan begitu setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945 dapat dikategorikan sebagai dan masuk dalam kesatuan sistem pendidikan nasional.

Tujuan pendidikan nasional juga dimuat dalam UU No. 20 Tahun 2003, yaitu bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Melalui tujuan tersebut, setiap unit atau organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dalam menjabarkan kegiatannya mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Untuk memudahkan dalam mencapai tujuan tersebut, menurut Sukardjo, bagi setiap unit pendidikan memiliki atau merumuskan pula tujuan pendidikan institusional, seperti tujuan pendidikan Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar sederajat, Sekolah Menengah Pertama sederajat, Sekolah Menengah Atas sederajat, Sekolah Menengah Kejuruan, Perguruan Tinggi. Seluruh institusi pendidikan tersebut harus tetap

mengacu atau tidak boleh bertentangan dengan UU Pendidikan Nasional.

Adapun prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional antara lain:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis,

dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

B. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana utama di dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tanpa pendidikan akan sulit diperoleh hasil dari kualitas sumber daya manusia yang maksimal. Kebutuhan akan pendidikan merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri, bahkan semua itu merupakan hak semua warga negara sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 pasal 31. Pengertian warga negara di sini yakni warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun di luar wilayah NKRI.

Hak setiap warga Negara dalam sistem pendidikan nasional menurut UU No. 20 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan / atau sosial yang berhak memperoleh pendidikan khusus.
3. Warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4. Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
5. Setiap warga Negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Sementara itu, kewajiban sebagai warga negara yaitu sebagai berikut.

1. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
2. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

C. Kelembagaan, Program dan Pengelolaan Pendidikan Nasional

Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok belajar atau melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal beserta program - programnya.

1. Kelembagaan Pendidikan

Dalam kelembagaan pendidikan, hal yang akan dibahas yaitu jalur pendidikan dan jenjang pendidikan. Pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jalur Pendidikan

Penyelenggaraan Sisdiknas dibedakan menjadi dua jalur (menurut UU No 2 Tahun 1989) yaitu:

- 1) Jalur Pendidikan Sekolah, yang diselenggarakan disekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan (pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi).
- 2) Jalur Pendidikan Luar Sekolah (PLS), yakni pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang dilaksanakan diluar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan, seperti kepramukaan, berbagai kursus, dan lain-lain. PLS memberikan kemungkinan perkembangan sosial, kultural seperti bahasa dan kesenian, keagamaan, dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat untuk mengembangkan dirinya dan membangun masyarakatnya. Pendidikan Luar Sekolah memiliki sifat tidak formal – dalam arti tidak ada keseragaman pola yang bersifat nasional – dan modelnya

sangat beragam. Dalam hubungan ini, pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur PLS yang diselenggarakan dalam keluarga yang fungsi utamanya menanamkan keyakinan agama, nilai budaya dan moral, serta keterampilan praktis. Sedangkan menurut UUSPN No. 20 Tahun 2003 Bab VI Pasal 13, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan tersebut diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

b. Jenjang Pendidikan

Berdasarkan UUSPN No. 2 Tahun 1989, Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman dalam pengajaran. Sedangkan menurut UUSPN No. 20 Tahun

2003, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Dalam Sisdiknas terdapat tiga jenjang pendidikan yaitu: jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi.

2. Program Pendidikan

Program pendidikan di tuangkan dalam jenis program pendidikan yang termasuk dalam jalur pendidikan sekolah serta kurikulum program pendidikan.

a. Jenis Program Pendidikan

Program pendidikan yang termasuk dalam jalur pendidikan sekolah terdiri atas :

- 1) Pendidikan Umum, merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang di wujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Pendidikan umum berfungsi sebagai acuan umum bagi jenis

pendidikan lainnya. Pendidikan ini berorientasi pada kecakapan hidup general, eksistensi diri, potensi diri, berpikir kritis, kreatif, dan kecakapan akademik. Pendidikan umum meliputi SD, SMP, SMA, dan Universitas.

2) Pendidikan kejuruan, merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu. Seperti bidang teknik, tata boga dan busana, perhotelan, kerajinan, administrasi perkantoran, dll. Pendidikan kejuruan berorientasi pada kecakapan vokasional. Bentuk lembaganya meliputi STM/SMK, SMTK, SMIP, SMIK.

3) Pendidikan Luar Biasa, merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental. Bentuk lembaga pendidikannya berupa Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). Sedang untuk pengadaan gurunya disediakan Sekolah

Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB) setara dengan Diploma III.

4) Pendidikan Kedinasan, merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintahan atau lembaga pendidikan nondepartemen. Pendidikan kedinasan dapat terdiri dari pendidikan tingkat menengah seperti SPK dan pendidikan tingkat tinggi seperti IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

5) Pendidikan Keagamaan. Berdasarkan UUSPN No. 20 Tahun 2003 Pasal 30 disebutkan bahwa :

a) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi

anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

- c) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- d) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhajasamanera, dan bentuk lain yang sejenis.
- e) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Jadi, pendidikan keagamaan merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menurut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Pendidikan

keagamaan dapat terdiri dari tingkat pendidikan dasar (MI), tingkat pendidikan menengah (Tsanawiyah, Aliyah), dan tingkat pendidikan tinggi (seperti IAIN sekarang UIN, Institut Hindu Darma, dsb). Berdasarkan ini berarti pendidikan keagamaan ada yang sepenuhnya memberikan pendidikan agama dan pendidikan umum yang setara dengan pendidikan umum yang setingkat.

b. Kurikulum Program Pendidikan

Berdasarkan UUSPN No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam UUSPN No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa:

1) Pasal 36

- Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar

nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

- Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - a) Peningkatan iman dan takwa;
 - b) Peningkatan akhlak mulia;
 - c) Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - d) Keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f) Tuntutan dunia kerja;
 - g) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

- h) Agama;
 - i) Dinamika perkembangan global;
dan
 - j) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2) Pasal 37

- Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
- a) Pendidikan Agama;
 - b) Pendidikan Kewarganegaraan;
 - c) Bahasa;
 - d) Matematika;
 - e) Ilmu Pengetahuan Alam;
 - f) Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - g) Seni Dan Budaya;
 - h) Pendidikan Jasmani dan Olahraga;
 - i) Keterampilan/Kejuruan; dan
 - j) Muatan Lokal.

- Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
 - a) Pendidikan Agama;
 - b) Pendidikan Kewarganegaraan; dan
 - c) Bahasa.
- Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3) Pasal 38

- Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk

pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.

- Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.
- Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

3. Pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional

Penanggung jawab pendidikan nasional adalah presiden, sedangkan pengelolaannya diatur sebagai berikut:

- a) Pengelolaan sistem pendidikan nasional pada umumnya diserahkan oleh presiden kepada departemen/menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan.
- b) Dalam hal tertentu, pengelolaan pendidikan nasional yang mengandung kekhususan,

diantaranya keagamaan dan kedinasan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional, diserahkan oleh presiden kepada departemen/badan pemerintah lainnya.

- c) Dalam mengelola pendidikan nasional, presiden dibantu oleh dewan pendidikan nasional yang anggotanya, antara lain, terdiri dari wakil – wakil pengelola dan unsur – unsur masyarakat. Dewan pendidikan nasional berfungsi sebagai penasihat presiden untuk masalah – masalah pendidikan nasional, juga penasihat badan kerja sama antara pengelola pendidikan nasional.

D. Upaya Pembangunan Pendidikan Nasional

Sistem pendidikan nasional sebagai struktur fungsional akan selalu menghadapi tantangan baru. Hal tersebut karena masyarakat yang selalu mengalami kemajuan dengan serta merta akibat timbulnya kebutuhan-kebutuhan baru. Untuk menghadapi tantangan-tantangan baru tersebut, sistem pendidikan selalu berupaya melakukan

pembaruan dengan jalan menyempurnakan sistemnya. Pembaruan yang terjadi dapat berupa landasan yuridis, kurikulum dan perangkat penunjangnya, struktur pendidikan, dan tenaga kependidikan. Pembaruan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar (fundamental) dan yang bersifat prinsipal. Hal ini disebabkan karena landasan yuridis mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenagaan.

Strategi pembangunan sistem pendidikan nasional memerlukan strategi tertentu. Adapun strategi pembangunan pendidikan nasional meliputi:

1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;

5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik;
7. Pembiayaan pendidikan sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan;
8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
9. Pelaksanaan wajib belajar;
10. Pelaksanaan otonomi satuan pendidikan;
11. Pemberdayaan peran masyarakat;
12. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.



Evaluasi

1. Apa pengertian dari sistem pendidikan nasional?
2. Mengapa dalam sistem pendidikan nasional Indonesia harus memiliki dasar dan tujuan?
3. Carilah 1 permasalahan dalam sistem pendidikan nasional Indonesia lalu berikan solusinya dengan konkrit!

BAB 7

ALIRAN – ALIRAN DALAM PENDIDIKAN

Aliran pendidikan merupakan berbagai pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berkembang seperti sebuah diskusi yang berkelanjutan, di mana gagasan-gagasan terdahulu senantiasa ditanggapi dengan dengan pro dan kontra oleh para pemikir berikutnya. Dari proses dialektis tersebut kemudian lahir pemikiran-pemikiran baru yang terus berkembang seiring dengan dinamika zaman.

A. Aliran Nativisme

Salah satu aliran pendidikan yang sangat besar pengaruhnya adalah aliran nativisme. Aliran nativisme berasal dari kata natus (lahir); nativis (pembawaan) yang ajarannya memandang manusia (anak manusia) sejak lahir telah membawa kekuatan yang disebut potensi (dasar). Tokoh utama aliran ini adalah Arthur

Schopenhauer (1788-1869), seorang filosofis Jerman.

Aliran ini berkeyakinan bahwa anak yang baru lahir membawa bakat, kesanggupan dan sifat- sifat tertentu. Sifat - sifat dan dasar - dasar tertentu yang bersifat keturunan (herediter) inilah yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak, serta hasil pendidikan sepenuhnya. Aliran nativisme menganggap pendidikan dan lingkungan tidak berpengaruh sama sekali dan tidak berkuasa. Menurut aliran ini, pendidikan dan lingkungan hanya sebagai wadah dan memberikan rangsangan saja. Apabila seorang anak berbakat jahat, maka ia akan menjadi jahat, begitu pula sebaliknya. Apabila seorang anak mempunyai potensi intelektual rendah maka akan tetap rendah. Pandangan tersebut di kenal dengan pesimisme paedagogis, karena sangat pesimis terhadap upaya- upaya dan hasil pendidikan.

Perana lingkungan sosial, pembinaan dan pendidikan begitu dikesampingkan pada aliran ini. Aliran nativisme nampaknya begitu yakin

terhadap potensi batin yang ada dalam diri manusia dan aliran ini erat kaitannya dengan aliran intuisme dalam penentuan baik dan buruk manusia. Aliran ini tampak kurang menghargai atau kurang memperhitungkan peran pembinaan dan pendidikan.

Nativisme menolak dengan tegas adanya pengaruh eksternal. Kalau kita menginginkan manusia menjadi baik, maka yang perlu dilakukan adalah memperbaiki kedua orang tuanya karena merekalah yang mewariskan faktor - faktor bawaan kepada anak - anaknya. Nativisme jelas merupakan aliran yang mengakui adanya daya-daya asli yang telah terbentuk sejak lahirnya manusia ke dunia. Daya - daya tersebut ada yang dapat tumbuh dan berkembang sampai pada titik maksimal kemampuan manusia dan ada yang dapat tumbuh berkembang hanya sampai pada titik tertentu sesuai dengan kemampuan individual manusia. Para ahli yang berpendirian nativis biasanya mempertahankan kebenaran konsep ini dengan menunjukkan

berbagai kesamaan atau kemiripan antara orang tua dengan anak-anaknya.

Meskipun dalam kenyataan sehari-hari, sering ditemukan anak mirip orang tua nya (secara fisik) dan anak juga mewarisi bakat-bakat yang ada pada orang tua nya. Tetapi pembawaan itu bukanlah merupakan satu-satunya faktor yang menentukan perkembangan. Terdapat suatu pokok pendapat aliran-aliran nativisme yang berpengaruh luas yakni bahwa dalam diri individu terdapat suatu “inti” pribadi yang mendorong manusia untuk mewujudkan diri, mendorong manusia dalam menentukan pilihan dan kemauan sendiri, dan yang menempatkan manusia sebagai makhluk aktif yang mempunyai kemauan bebas. Meskipun pandangan ini mengakui pentingnya belajar, namun pengalaman dalam belajar itu ataupun dalam penerimaan dan persepsi seseorang banyak ditentukan oleh kemampuan memberi makna kepada apa yang dialaminya itu. Dengan kata lain, pengalaman belajar ditentukan oleh “*internal frame of reference*” yang dimiliki.

B. Aliran Empirisme

Aliran ini bertolak dari *Lockean Tradition* yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia, dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedang pembawaan tidak dipentingkan.

Aliran empirisme bertentangan dengan paham aliran nativisme. Empirisme berasal dari kata *empire*, artinya pengalaman. Nama asli aliran ini adalah "*the school of british Empiricism*" (aliran empirisme Inggris). Namun aliran ini lebih berpengaruh terhadap para pemikir Amerika Serikat, sehingga melahirkan sebuah aliran filsafat bernama "*environmentalisme*" (aliran lingkungan) dan psikologi bernama "*environmental psychology*" (psikologi lingkungan) yang relatif masih baru. Empirisme tidak mengakui adanya pembawaan atau potensi yang dibawa lahir manusia. Dengan kata lain bahwa manusia itu lahir dalam keadaan suci, tidak membawa apa – apa.

Tokoh utama aliran ini adalah filsuf Inggris bernama John Locke (1704-1932) yang mengembangkan paham rasionalisme pada abad ke-18. Teori ini mengatakan bahwa anak yang lahir ke dunia dapat diumpamakan seperti kertas putih yang kosong yang belum ditulisi, teori ini dikenal dengan istilah “tabularasa” (*a blank sheet of paper*). Teori ini mengatakan bahwa manusia yang lahir adalah anak yang suci seperti meja lilin. Dengan demikian, menurut aliran ini anak-anak yang lahir ke dunia tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa, sebagai kertas putih yang polos. Oleh karena itu, anak-anak dapat dibentuk sesuai dengan keinginan orang dewasa yang memberikan warna pendidikannya.

Menurut pandangan empirisme (biasa pula disebut *environmentalisme*) pendidik memegang peranan yang sangat penting sebab pendidik dapat menyediakan lingkungan pendidikan kepada anak dan akan diterima oleh anak sebagai pengalaman-pengalaman. Pengalaman-

pengalaman itu tentunya yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

Aliran empirisme dipandang berat sebelah sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan, menurut kenyataan dalam kehidupan sehari-hari terdapat anak yang berhasil karena berbakat, meskipun lingkungan sekitarnya tidak mendukung. Keberhasilan ini disebabkan oleh adanya kemampuan yang berasal dari dalam diri yang berupa kecerdasan atau kemauan keras, anak berusaha mendapatkan lingkungan yang dapat mengembangkan bakat atau kemampuan yang telah ada dalam dirinya.

C. Aliran Naturalisme

Aliran ini pada dasarnya hampir sama dengan nativisme, namun aliran naturalisme meyakini adanya pembawaan dan juga milieu (lingkungan). Tokoh Aliran ini adalah J.J Rousseau, seorang filosof Prancis tahun (1712-1778) Rousseau berpendapat dalam

bukunya "Semua anak adalah baik pada waktu baru datang dari sang pencipta, tetapi menjadi buruk ditangan manusia." Berbeda dengan Schopenhauer, Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru lahir mempunyai bawaan yang baik, tidak seorangpun anak lahir dengan pembawaan buruk. Namun akan rusak oleh tangan manusia. Rousseau ingin menjauhkan anak dari segala keburukan masyarakat yang serba dibuat-buat atau bersifat "*artificial*", sehingga kebaikan anak-anak yang dimiliki secara alamiah sejak saat kelahirannya itu dapat berkembang secara spontan dan bebas.

Selanjutnya Rousseau mengatakan, anak yang terlahir dalam keadaan baik tersebut biarkan berkembang secara alami. Ini artinya bahwa perkembangan anak yang dipengaruhi oleh pendidikan apakah pendidikan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat sebagai urun rembuk orang-orang dewasa malah akan merusak pembawaan anak yang baik. Hal ini

seperti dikemukakan oleh J.J. Rousseau, yaitu: “segala sesuatu adalah baik ketika ia berbuat keluar dari alam, dan segala sesuatu menjadi jelek manakala ia sudah berada ditangan manusia”.

J.J. Rousseau mengusulkan perlunya permainan bebas kepada anak didik untuk mengembangkan pembawaannya, kemampuan-kemampuannya, dan kecenderungan-kecenderungannya. Pendidikan harus dijauhkan dalam perkembangan anak karena hal itu berarti dapat menjauhkan anak dari segala hal yang bersifat dibuat-buat (*artificial*) dan dapat membawa anak kembali ke alam untuk mempertahankan segala yang baik. Seperti diketahui, gagasan naturalisme yang menolak campur tangan pendidikan, sampai saat ini tidak terbukti malahan sebaliknya: pendidikan semakin lama semakin diperlukan.

D. Aliran Konvergensi

Perintis aliran ini adalah William Stern (1871 – 1939), seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak

dilahirkan didunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Sebaliknya lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal jika memang pada diri anak tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk mengembangkan itu. Sebagai contoh, hakikat kemampuan anak pada manusia dengan kata-kata adalah hasil konvergensi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa aliran konvergensi (*convergentie*: penyatuan hasil, kerjasama mencapai suatu hasil) merupakan gabungan dari aliran nativisme dan empirisme.

Pada anak manusia ada pembawaan untuk berbicara melalui situasi lingkungannya, anak belajar berbicara dalam bahasa tertentu.

Lingkungan pun mempengaruhi anak didik dalam mengembangkan pembawaan bahasanya. Karena itu tiap anak manusia mula-mula menggunakan bahasa lingkungannya misalnya bahasa Jawa, Sunda, Inggris, dll. Kemampuan dua orang anak untuk mempelajari bahasa mungkin tidak sama. Hal itu disebabkan oleh adanya perbedaan kuantitas pembawaan dan perbedaan situasi lingkungan biarpun lingkungan kedua orang anak tersebut menggunakan bahasa yang sama.

William Stern berpendapat bahwa hasil pendidikan itu tergantung dari pembawaan dan lingkungan, seakan-akan dua garis yang menuju satu titik pertemuan. Karena itu teori William Stern disebut teori konvergensi. Jadi menurut teori konvergensi ada tiga prinsip yang berlaku, yakni:

1. Pendidikan mungkin untuk dilaksanakan.
2. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan

mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik.

3. Yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan.

Aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia. Meskipun demikian terdapat variasi pendapat tentang faktor-faktor yang paling penting dalam menentukan tumbuh kembang itu seperti telah dikemukakan bahwa variasi-variasi itu tercermin antara lain dalam perbedaan pandangan tentang strategi yang tepat untuk memahami perilaku manusia, seperti strategi disposisional atau konstitusional, strategi fenomenologis atau humanistik, strategi behavioral, strategi psikodinamik, psikoanalitik demikian pula halnya dalam belajar mengajar, variasi pendapat itu telah menyebabkan munculnya berbagai teori belajar atau teori mengajar.

Pandangan aliran konvergensi tentu saja memberi arah yang jelas mengenai pentingnya

pendidikan, yakni pendidikan harus dilakukan agar potensi anak dapat ditingkatkan sehingga bakat yang ada semakin terasah. Jadi, semuanya dapat berjalan seiring dengan peran masing – masing.

E. Aliran Progresivisme

Progresivime adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak-anak (*child-centered*), sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru (*teacher-centered*) atau bahan pelajaran (*subject-centered*). Salah satu tokoh aliran Progresivisme adalah John Dewey.

Aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan, ataupun masalah-masalah yang bersifat mengancam dirinya. Aliran ini memandang bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Hal itu ditunjukkan dengan fakta bahwa manusia mempunyai kelebihan jika dibanding makhluk

lain. Manusia memiliki sifat dinamis dan kreatif yang didukung oleh kecerdasannya sebagai bekal menghadapi dan memecahkan masalah.

Peningkatan kecerdasan menjadi tugas utama pendidik, yang secara teori mengerti karakter peserta didiknya. Peserta didik tidak hanya dipandang sebagai kesatuan jasmani dan rohani, namun juga termanifestasikan di dalam tingkah laku dan perbuatan yang berada dalam pengalamannya. Jasmani dan rohani, terutama kecerdasan, perlu dioptimalkan. Artinya, peserta didik diberi kesempatan untuk bebas dari sebanyak mungkin mengambil bagian dalam kejadian - kejadian yang berlangsung disekitarnya, sehingga suasana belajar timbul di dalam maupun di luar sekolah. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja, bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan harusnya merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak.

Kurikulum progresivisme memuat kurikulum yang berisi pengalaman-pengalaman atau kegiatan-kegiatan belajar yang diminati oleh setiap peserta didik (*experience curriculum*). Metode pendidikan progresivisme antara lain:

1. Metode belajar aktif.
2. Metode memonitor kegiatan belajar.
3. Metode penelitian ilmiah

F. Aliran Perennialisme

Perennialisme berasal dari kata *perennial* diartikan sebagai *continuing throughout the whole year* atau *lasting for a very long time*, yakni abadi atau kekal dan dapat berarti pula tiada akhir. Dengan demikian, esensi kepercayaan filsafat perenial ialah berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Aliran ini mengambil analogi realita sosial budaya manusia, seperti realita sepothon bunga yang terus menerus mekar dari musim ke musim, datang dan pergi, berubah warna secara tetap sepanjang masa, dengan gejala yang terus ada dan sama. Jika gejala dari musim ke musim itu dihubungkan satu dengan yang lainnya seolah-

olah merupakan benang dengan corak warna yang khas, dan terus menerus sama. Dalam pengertiannya yang lebih umum dapat dikatakan bahwa tradisi dipandang juga sebagai prinsipprinsip yang abadi yang terus mengalir sepanjang sejarah manusia, karena ini adalah anugrah Tuhan pada semua manusia dan memang merupakan hakikat insaniah manusia.

Aliran perenialisme dalam pendidikan lahir pada abad ke-20. Perenialisme lahir dari suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perenialisme menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Teori atau konsep pendidikan perenialisme dilatarbelakangi oleh filsafat-filsafat Plato (427-347 SM) sebagai Bapak Idealisme Klasik, filsafat Aritoteles (384-322 SM) sebagai Bapak Realisme Klasik dan filsafat Thomas Aquinas.

Perenialisme memandang situasi dunia dewasa ini penuh kekacauan, ketidakpastian, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosio-kultural. Solusi yang ditawarkan kaum

perenialis adalah dengan jalan mundur ke belakang dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kukuh, kuat pada zaman kuno dan abad pertengahan. Peradaban-kuno (Yunani Purba) dan abad pertengahan dianggap sebagai dasar budaya bangsa-bangsa di dunia dari masa ke masa dan dari abad ke abad. Oleh karena itu, perenialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal yang dimaksud, *education as cultural regression*. Perenialisme tidak melihat jalan yang meyakinkan selain kembali kepada prinsip-prinsip yang telah sedemikian membentuk sikap kebiasaan, bahkan kepribadian manusia selain kebudayaan dahulu dan kebudayaan abad pertengahan. Perenialisme tidak memiliki kepercayaan diri bahwa zaman ini tidak akan berubah menjadi baik jika tidak kembali pada nilai-nilai budaya lama yang dianggapnya ideal dan sudah mapan.

Dengan demikian bahwa aliran perenialisme ini menginginkan bahwa zaman terdahulu (lampau) tetap dipertahankan dan diabadikan. Sebab zaman modern banyak membawa kerusakan kepada manusia. Hal tersebut juga termasuk didalam mempelajari perenialisme pendidikan, menurut aliran ini belajar adalah untuk berfikir. Aliran ini meyakini bahwa dengan cara latihan berfikir, peserta didik akan memiliki senjata ampuh dalam menghadapi berbagai rintangan yang akan menurunkan martabat kemanusiaannya, seperti kebodohan, kebingungan, dan keragu - ragan. Tugas seorang peserta didik menurut aliran ini adalah mempelajari berbagai karya dalam berbagai literatur filsafat, sejarah, dan sains, sehingga dengan demikian ia berkenalan dengan berbagai prestasi di masa lalu menuju pembentukan pemikiran yang akan mengisi kehidupannya dalam membangun prestasi - prestasinya pula. Para peserta didik dalam hal ini mesti meraih subjek - subjek dasar tertentu yang akan mengajarkan kepadanya hal-hal yang permanen

tentang dunia. Subjek - subjek dasar seperti bahasa, sejarah, matematika, pengetahuan alam, filsafat dan seni merupakan hal penting yang sangat berguna bagi mereka dalam mengembangkan pemikirannya, sehingga dengan demikian mereka pun memiliki kemampuan rasional yang kokoh dalam menghadapi tentangan realitas kehidupannya.

Salah satu tokoh dalam aliran ini adalah Ortimer Adler adalah seorang tokoh yang hidup dari tahun 1902-2001. Ia berpandangan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kemampuan intelektual yang tampak dalam kapasitasnya sebagai subjek yang aktif dan dapat melakukan tindakan-tindakan sendiri seperti membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, dan serta berfikir.



Evaluasi

1. Buatlah peta konsep tentang aliran – aliran dalam pendidikan!

2. Bagaimana implementasi aliran – aliran tersebut dalam pendidikan?
3. Dari ke enam aliran – aliran tersebut, kategorikan yang termasuk aliran pendidikan klasik dan aliran pendidikan modern dan berikan argumentasinya!

BAB 8

PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP

A. Konsep Pendidikan Seumur Hidup

Konsep pendidikan seumur hidup, sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar pendidikan dari zaman ke zaman. Apalagi bagi umat Islam, jauh sebelum orang-orang barat mengangkatnya, Islam sudah mengenal pendidikan seumur hidup, sebagaimana dinyatakan oleh Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

أَطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

“Tuntutlah ilmu dari buaian sampai liang lahat”.

Di dunia Barat, konsep pendidikan seumur hidup (*lifelong education*) ini pada mulanya dikemukakan oleh filosof dan pendidik Amerika yang sangat terkenal yaitu John Dewey. Kemudian dipopulerkan kembali oleh Paul Langrend melalui bukunya *An Introduction to Life Long Education* pada tahun 1970 dan

dikembangkan oleh UNESCO. Menurut John Dewey, pendidikan itu menyatu dengan hidup. Oleh karena itu pendidikan terus berlangsung sepanjang hidup sehingga pendidikan itu tidak pernah berakhir. Konsep pendidikan seumur hidup merumuskan suatu asas bahwa pendidikan adalah suatu proses yang terus-menerus (kontinu) dari bayi sampai meninggal dunia.

Pendidikan seumur hidup bukan suatu sistem pendidikan yang berstruktur, melainkan suatu prinsip yang mendasar yang menjiwai seluruh organisasi sistem pendidikan yang ada. Dengan kata lain, pendidikan seumur hidup menembus batas-batas kelembagaan, pengelolaan, dan program yang telah berabad-abad mendesakan diri pada sistem pendidikan. Prinsip ini berarti, masa sekolah bukan satu – satunya masa bagi setiap orang untuk belajar, melainkan hanya sebagian dari waktu belajar yang akan berlangsung seumur hidup. Pendidikan seumur hidup ini menolak pandangan bahwa pendidikan adalah yang lazim kita sebut sebagai sekolah.

Ada dua tujuan pendidikan manusia seutuhnya dan seumur hidup, yaitu :

1. Mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaannya seoptimal mungkin. Sehingga secara potensial keseluruhan potensi manusia diisi kebutuhannya agar berkembang secara wajar.
2. Dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis maka pendidikan wajib belajar berlangsung selama manusia hidup.

Di dalam UU no 2 tahun 1989, penegasan tentang pendidikan seumur hidup di kemukakan dalam pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah. Jalur pendidikan luar sekolah dalam hal ini termasuk di dalamnya pendidikan keluarga sebagaimana dijelaskan pada ayat (4), yaitu “Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang di selenggarakan

dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, budaya, nilai moral, dan keterampilan.”

Dasar pendidikan seumur hidup bertitik tolak atas keyakinan bahwa proses pendidikan dapat berlangsung selama manusia hidup, baik di dalam maupun di luar sekolah. Dalam pendidikan seumur hidup dikenal 4 macam konsep kunci, yaitu:

1. Konsep Pendidikan Seumur Hidup

Sebagaimana suatu konsep, maka pendidikan seumur hidup diartikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman - pengalaman. Hal ini berarti pendidikan meliputi berbagai usia - usia mulai dari anak usia dini sampai lansia.

2. Konsep Belajar Seumur Hidup

Konsep belajar seumur hidup adalah respon terhadap keinginan yang didasar untuk belajar dan angan-angan menyediakan kondisi - kondisi yang membantu belajar. Jadi, istilah belajar merupakan kegiatan yang dikelola dari proses belajar meski tanpa adanya organisasi sekolah serta kegiatan ini mengarah pada

penyelenggaraann asas pendidikan seumur hidup.

3. Konsep Pelajar Seumur Hidup

Belajar seumur hidup diartikan bahwa seseorang menyadari bahwa dirinya adalah pelajar seumur hidup, melihat dari sisi belajar adalah cara untuk memecahkan atau mengatasi suatu problema. Pendidikan seumur hidup kaitannya pada penyediaan sistem formal yang bertujuan untuk membantu perkembangan orang-orang, secara sadar dan sistematis merespon untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka seumur hidup. Mereka yang sadar akan menjadi pelajar seumur hidup adalah orang-orang yang mau menerima tantangan dan terdorong tinggi untuk belajar sesuatu hal yang baru.

4. Kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup

Kurikulum di sini benar-benar dirancang untuk menghasilkan pendidikan seumur hidup. Cara mengajarnya juga berdasarkan prinsip konsep pendidikan seumur hidup. Menjadi

pelajar seumur hidup dan belajar seumur hidup adalah hasil dari yang diharapkan, dan kurikulum adalah jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Dasar pendidikan seumur hidup merupakan proses pendidikan yang berlangsung selama manusia itu masih hidup dan berkembang.

B. Dasar Pemikiran Pendidikan Seumur Hidup

Dasar pendidikan seumur hidup bertitik tolak atas keyakinan bahwa proses pendidikan dapat berlangsung selama manusia hidup, baik di dalam maupun di luar sekolah. Ada bermacam-macam dasar pemikiran yang menyatakan bahwa pendidikan seumur hidup sangat penting. Dasar pemikiran tersebut ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

1. Dasar Ideologi

Pendidikan seumur hidup atau long life education akan memungkinkan seseorang mengembangkan potensinya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya semua manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama khususnya hak untuk mendapatkan

pendidikan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilannya (*skill*).

2. Dasar Ekonomis

Pendidikan merupakan cara paling efektif untuk keluar dari suatu lingkaran yang menyeret kepada kebodohan dan kemelaratan. Pendidikan seumur hidup dalam konteks ini memungkinkan seseorang untuk:

- a) Meningkatkan produktivitasnya.
- b) Memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimilikinya.
- c) Memungkinkan hidup dalam hidup dalam lingkungan yang lebih sehat dan menyenangkan.
- d) Memiliki motivasi dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya secara tepat sehingga peran pendidikan keluarga menjadi sangat penting dan besar artinya.

3. Dasar Sosiologis

Para orang tua di negara berkembang masih kurang menyadari diri akan pentingnya pendidikan formal bagi anak - anaknya. Oleh karena itu, anak - anak mereka kurang

mendapatkan pendidikan formal, putus sekolah, dan atau tidak bersekolah sama sekali. Dengan demikian, pendidikan seumur hidup bagi orang tua akan menjadi solusi dari pemecahan masalah tersebut.

4. Dasar Filosofis

Negara-negara demokrasi menginginkan seluruh rakyatnya menyadari pentingnya hak memilih dan memahami fungsi pemerintah, DPR, DPD, dan sebagainya. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu diberikan kepada setiap orang. Hal ini menjadi tugas pendidikan seumur hidup.

5. Dasar Teknologis

Di era glogalisasi seperti sekarang ini, tampaknya dunia dilanda oleh eksplosif ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan berbagai produk yang dihasilkannya. Semua orang, tidak terkecuali para pendidik, sarjana, pemimpin dan sebagainya dituntut selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilannya.

6. Dasar Psikologis dan Pedagogi

Diakui bahwa perkembangan IPTEK yang pesat punya dampak dan pengaruh besar terhadap berbagai konsep teknik, dan metode pendidikan. Perkembangan tersebut juga semakin luas, dalam, dan kompleks, yang menyebabkan ilmu pengetahuan tidak mungkin lagi diajarkan seluruhnya kepada peserta didik di sekolah. Tugas pendidik jalur sekolah yang utama sekarang adalah mengajarkan bagaimana cara belajar, menanamkan motivasi yang kuat dalam diri anak untuk belajar terus sepanjang hidupnya, memberikan keterampilan kepada peserta didik secara efektif agar dia mampu beradaptasi dalam masyarakat yang cenderung berubah secara cepat.

C. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Seumur Hidup

Pendidikan seumur hidup adalah pendidikan tidak berhenti hingga individu menjadi dewasa, tetapi tetap berlanjut sepanjang hidupnya. Pendidikan sepanjang hayat menjadi semakin

tinggi urgensinya pada saat ini karena manusia terus menerus menyesuaikan diri supaya tetap hidup secara wajar dalam lingkungan masyarakat yang selalu berubah. Sisi lain pendidikan seumur hidup adalah peluang yang luas bagi seseorang untuk terus belajar agar dapat meraih keadaan kehidupan yang lebih baik.

Hal-hal yang menyebabkan dan memungkinkan keadaan seperti itu adalah:

1. Majunya ilmu dan teknologi
2. Produk-produk teknologi yang perlu dipelajari karena terkait dengan alat -alat kerja bagi mereka yang menggunakan alat kerja berbasis teknologi
3. Perubahan sosial sebagai dampak majunya ilmu dan teknologi

Dalam hubungannya dengan belajar sepanjang hayat akan di kemukakan tugas - tugas perkembangan masa dewasa awal, masa setengah baya, dan orang tua, untuk memberikan pengalaman belajar yang sesuai dalam rangka

belajar sepanjang hayat. Tugas perkembangan tersebut adalah:

1. Tugas perkembangan masa dewasa awal: memilih pasangan hidup, bertanggung jawab sebagai warga negara, dan berupaya mendapatkan kelompok sosial yang tepat serta menarik.
2. Tugas perkembangan masa setengah baya: bertanggung jawab sosial dan menjadi warga negara yang baik, mengisi waktu senggang dengan kegiatan - kegiatan tertentu, menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dan pertambahan umur.
3. Tugas perkembangan orang tua: menyesuaikan diri dengan menurutnya kekuatan fisik, kesehatan dan pendapatan. Menyesuaikan diri dengan keadaan sebagai janda, duda, mememuhi kewajiban sosial sebagai seorang warga negara yang baik dan membangun kehidupan fisik yang memuaskan.

Tugas-tugas perkembangan itu nampaknya di siapkan untuk belajar sepanjang hayat, yang

dapat dilihat dari adanya tugas perkembangan orang dewasa, setengah baya dan untuk masa tua. Tugas perkembangan ini juga amat berguna bagi pendidikan luar sekolah, di rumah dalam kehidupan rumah tangga maupun di lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat, seperti kursus-kursus, perkumpulan sosial, agama, persatuan para lanjut usia dan sebagainya. Dengan demikian tugas perkembangan yang di tempuh melalui belajar, tidak hanya di mulai dari masa kanak-kanak, tetapi berlanjut sampai masa dewasa dan masa tua. Jelas bahwa belajar berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan sepanjang kehidupan seseorang.

D. Implikasi Pendidikan Seumur Hidup dalam Program dan Sasaran Pendidikan

Implikasi adalah akibat langsung dari konsekuensi suatu keputusan, jadi sesuatu yang merupakan tindakan lanjut dari satu keputusan atau kebijakan. Implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan sebagai mana dikemukakan oleh Ananda W.P. Guruge dalam

bukunya "*Toward Better Education Management*", dalam garis besarnya dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori berikut:

1. Pendidikan Tulis Fungsional.

Program pendidikan ini tidak saja penting bagi pendidikan seumur hidup karena relevansinya dengan kondisi yang ada pada negara-negara berkembang dengan alasan masih banyaknya penduduk yang buta huruf, melainkan juga sangat penting ditinjau dari implementasinya. Realisasi baca tulis fungsional, minimal memuat dua hal, yaitu:

- a. Memberikan kecakapan membaca, menulis, menghitung, (3 M) yang fungsional bagi anak didik.
- b. Menyediakan bahan-bahan bacaan yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang telah dimilikinya.

2. Pendidikan Vokasional

Pendidikan vokasional sebagai program pendidikan di luar sekolah bagi anak diluar batas usia sekolah, atau sebagai program pendidikan formal dan nonformal dalam

rangka *apprentice ship training*, merupakan salah satu program penting dalam rangka pendidikan seumur hidup. Pada kebanyakan negara berkembang yang sistem pendidikan formalnya umumnya diambil dari negara barat, *out put* pendidikan sekolah pada umumnya dirasakan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Oleh sebab itu, program pendidikan yang bersifat remedial agar para lulusan sekolah tersebut menjadi tenaga kerja yang produktif menjadi sangat penting.

3. Pendidikan Profesional

Sebagai realisasi pendidikan seumur hidup, dalam tiap-tiap profesi hendaknya telah menciptakan *built in mechanism* yang memungkinkan golongan profesional terus mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan yang menyangkut metodologi, perlengkapan, terminologi, dan sikap profesional nya.

4. Pendidikan ke Arah Perubahan dan Pembangunan

Diakui bahwa era globalisasi dan informasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan IPTEK telah memengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat, dari cara memasak yang serba menggunakan mekanik dan elektronik, sampai dengan cara menerobos angkasa luar. Kenyataan ini tentu saja konsekuensinya menuntut pendidikan yang berlangsung secara kontinu.

5. Pendidikan Kewarganegaraan dan Kedewasaan Politik

Di samping tuntutan penguasaan IPTEK, dalam kondisi sekarang dimana pola pikir masyarakat semakin maju dan kritis, baik rakyat biasa maupun pemimpin pemerintah di negara yang demokratis, diperlukan pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik baik setiap warga negara.

6. Pendidikan Kultural dan Pengisi Waktu Senggang

Spesialisasi yang berlebih-lebihan dalam masyarakat, bahkan yang dimulai pada usia muda dalam program pendidikan formal di

sekolah, membuat manusia berpandangan sempit pada bidangnya sendiri, buta akan nilai-nilai kultural yang terkandung dalam warisan budaya masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, bagi orang – orang terpelajar diharapkan mampu memahami dan menghargai nilai – nilai agama, sejarah, kesusastraan, filsafat hidup, seni, dan musik bangsanya sendiri. Hal ini berguna untuk memperkaya hidupnya, terutama dari sisi pengalaman yang memungkinkan untuk mengisi waktu luang yang menyenangkan.

Adapun mengenai konsep pendidikan seumur hidup pada sasaran pendidikan, Ananda W. P. Gurugue juga mengklasifikasikannya dalam 6 kategori masing-masing dengan prioritas programnya, yaitu:

1. Para Buruh dan Petani

Mereka dengan pendidikan yang sangat rendah atau bahkan tanpa pendidikan sama sekali merupakan golongan terbesar penduduk di negara-negara yang sedang berkembang. Cara hidup mereka yang

tradisional itu merupakan suatu hambatan psikologis bagi pembangunan. Pendidikan menjadi penting bagi mereka, apabila program tersebut dapat:

- a. Menolong meningkatkan produktifitas mereka.
- b. Mendidik mereka akan kewajiban sebagai warganegara dan kepala keluarga, sehingga mereka sadar akan pentingnya pendidikan.
- c. Mengisi waktu senggang mereka dengan kegiatan yang produktif dan menyenangkan.

Golongan buruh dan petani inilah yang terutama membutuhkan program baca tulis fungsional (*functional literary*). Mereka pasti akan menyadari manfaat program itu apabilaketiga hal tersebut benar-benar diperhatikan.

2. Golongan Remaja yang Terganggu Pendidikan Sekolahnya

Golongan remaja yang menganggur yang tidak mendapatkan ketrampilan karena

kurangnya bakat dan kemampuannya memerlukan pendidikan vokasional kasus dan demi perkembangan pribadinya, mereka perlu diberikan pendidikan kultural dan kegiatan yang kreatif. Namun golongan yang terpenting bagi golongan anak didik ini ialah pendidikan yang bersifat remedial. Mungkin mereka meninggalkan pendidikan disekolah karena tidak tertarik, bosan atau tidak melihat manfaat pendidikan sekolah itu bagi kehidupannya. Sebab itu program pendidikan remedial yang diberikan kepadanya harus dapat menarik, merangsang dan relevan dengan kebutuhan hidupnya.

3. Para Pekerja yang Berketrampilan

Program yang disediakan bagi para pekerja yang berketrampilan harus mengandung dua maksud yaitu:

- a. Program itu harus mampu menyelamatkan mereka dari keusangan pengetahuannya dan otomasi, kepada mereka perlu

diberikan latihan-latihan kembali untuk mendapatkan ketrampilan baru.

b. Program ini harus membuka jalan bagi mereka untuk naik jenjang dalam rangka promosi kedudukan yang lebih baik.

4. Golongan teknis dan profesional

Mereka pada umumnya menduduki posisi yang penting dalam masyarakat dan program pendidikan seumur hidup sangat besar perannya bagi golongan ini. Agar mereka tetap berperan dalam masyarakat, maka mereka harus senantiasa memperbarui dan menambah keterampilannya. Golongan ini umumnya memiliki kebiasaan dan motivasi yang kuat dalam *self learning*.

5. Para pemimpin dalam masyarakat

Para pemimpin dalam masyarakat perlu selalu memperbaiki ide - idenya agar mereka dapat tetap berfungsi memimpin masyarakat sesuai dengan gerak kemajuan dan pembangunan. Mereka harus mampu mensistensikan pengetahuan dan berbagai macam keterampilan maupun keahlian.

Kemampuan mensistensikan itu tidak diperoleh dari pendidikan sekolah biasa. Sebab itu program pendidikan untuk mencapai tujuan tersebut perlu diadakan.

6. Golongan anggota yang sudah tua

Seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup serta kondisi Kesehatan yang membaik, jumlah anggota golongan masyarakat lanjut usia cenderung terus bertambah. Oleh karena itu, kelompok usia lanjut juga memerlukan layanan pendidikan seumur hidup. Dalam kerangka pendidikan seumur hidup, program pendidikan bagi lanjut usia bertujuan untuk memenuhi dorongan intrinsic untuk mengetahui hal-hal baru, memperkaya wawasan, serta menjaga kualitas kehidupan, tanpa harus selalu dikaitkan dengan kegunaan atau keuntungan materiil. Sebagai contoh: kursus membaca Al-Qur'an bagi lansia, kelas seni dan kerajinan tangan, kajian keagamaan atau kebudayaan di komunitas lansia merupakan bentuk pendidikan seumur hidup yang dapat diikuti

oleh kelompok usia lanjut. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga berperan dalam menjaga kesehatan mental, meningkatkan rasa percaya diri, dan memperkuat interaksi sosial para lanjut usia.



Evaluasi

1. Bagaimana konsep pendidikan seumur hidup?
2. Setelah membaca materi di atas, menurut anda apa tujuan pendidikan seumur hidup ?

BAB 9

DEMOKRASI PENDIDIKAN

Demokrasi Pendidikan

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni dari kata *demoscratia*. *Demos* yang berarti rakyat dan *cratos* yang berarti kekuasaan atau undang-undang. Jadi, demokrasi adalah kekuasaan atau undang-undang yang berakarkan pada rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Artinya, demokrasi merupakan suatu cara hidup, suatu *way of life* yang menekankan nilai individu dan intelegensi serta manusia percaya bahwa dalam berbuat bersama manusia menunjukkan adanya hubungan sosial yang mencerminkan adanya saling menghormati, kerjasama, toleransi, dan *fair play*. Dalam pendidikan, demokrasi

ditunjukkan dengan pemusatan perhatian serta usaha pada si anak didik dalam keadaan sewajarnya (intelekuensi, kesehatan, keadaan sosial, dan sebagainya).

Dalam arti luas, demokrasi pendidikan memuat tiga hal yaitu:

1. Rasa hormat terhadap harkat sesama manusia

Demokrasi pada prinsip ini dianggap sebagai pilar pertama untuk menjamin persaudaraan hak manusia dengan tidak memandang jenis kelamin, umur, warna kulit, agama dan bangsa. Dalam pendidikan, nilai-nilai inilah yang ditanamkan dengan memandang perbedaan antara satu dengan yang lainnya baik hubungan antara sesama peserta didik atau hubungan dengan gurunya yang saling menghargai dan menghormati.

2. Setiap manusia memiliki perubahan ke arah pikiran yang sehat

Dari prinsip inilah timbul pandangan bahwa manusia itu harus di didik, karena dengan pendidikan itu manusia akan berubah

dan berkembang ke arah yang lebih sehat, baik dan sempurna. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan anak didik untuk berpikir dan memecahkan persoalan-persoalannya sendiri secara teratur, sistematis dan komprehensif serta kritis sehingga anak didik memiliki wawasan, kemampuan dan kesempatan yang luas.

3. Rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama

Kesejahteraan dan kebahagiaan hanya tercapai bila setiap warga negara atau anggota masyarakat dapat mengembangkan tenaga atau pikirannya untuk memajukan kepentingan bersama. Karena itulah kebersamaan dan kerjasama merupakan salah satu pilar penyangga demokrasi.

Berkenaan dengan itulah maka bagi setiap warga negara diperlukan hal-hal berikut ini:

1. Pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah kewarganegaraan, kemasyarakatan,

ketatanegaraan, soal-soal pemerintahan yang penting.

2. Suatu keinsyafan dan kesanggupan semangat menjalankan tugasnya, dengan mendahulukan kepentingan negara atau masyarakat daripada kepentingan sendiri atau kepentingan sekelompok kecil manusia.
3. Suatu keinsyafan dan kesanggupan memberantas kecurangan-kecurangan dan perbuatan-perbuatan yang menghalangi kemajuan dan kemakmuran masyarakat dan pemerintah.

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa demokrasi pendidikan adalah suatu kewajiban dan hak-hak yang ada didalam dunia pendidikan serta kita dapat memiliki peluang diskusi untuk berpendapat serta menerapkan nilai-nilai moral yang telah ditetapkan.

A. Prinsip – Prinsip Demokrasi Pendidikan

Dalam setiap pelaksanaan pendidikan selalu terkait dengan masalah-masalah antara lain:

1. Hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan

2. Kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan

3. Hak dan kesempatan atas dasar kemampuan.

Dari prinsip-prinsip di atas dapat dipahami bahwa ide dan nilai demokrasi pendidikan itu sangat banyak dipengaruhi oleh alam pikiran, sifat dan jenis masyarakat dimana mereka berada, karena dalam realitasnya bahwa pengembangan demokrasi pendidikan itu akan banyak dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan penghidupan masyarakat. Misalnya masyarakat agraris akan berbeda dengan masyarakat metropolitan dan modern, dan sebagainya.

Apabila yang dikemukakan tersebut dikaitkan dengan prinsip-prinsip demokrasi pendidikan yang telah diungkapkan, tampaknya ada beberapa butir penting yang harus diketahui dan diperhatikan, diantaranya :

1. Keadilan dalam pemerataan kesempatan belajar bagi semua warga negara dengan cara adanya pembuktian kesetiaan dan konsisten pada sistem politik yang ada;

2. Dalam upaya pembentukan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik;
3. Memiliki suatu ikatan yang erat dengan cita-cita nasional.

Melihat dari hal - hal di atas, bahwa bangsa Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang lainnya. Untuk itu, dalam pengembangan prinsip demokrasi pendidikan yang harus berorientasikan pada cita-cita dan nilai demokrasi bangsa dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai luhurnya, wajib melindungi dan menghormati hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur serta pemenuhan setiap hak warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan mengembangkan potensi yang dimiliki.

Pengembangan demokrasi pendidikan yang berorientasi pada cita-cita dan nilai demokrasi akan selalu memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai luhurnya;
2. Menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur;
3. Mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya, dalam rangka mengembangkan kreasinya ke arah perkembangan dan kemajuan iptek tanpa merugikan pihak lain.

Dari prinsip-prinsip demokrasi di atas, maka dapat dipahami bahwa ide dan nilai demokrasi sangat dipengaruhi oleh alam pikiran, sifat dan jenis masyarakat dimana ia berada.

Jadi, dalam demokrasi pendidikan, anak tidak saja dipersiapkan sekedar cerdas dan terampil, tetapi mampu menghargai orang lain, di samping beriman dan intelektual. Kemampuan demikian memerlukan pengayaan pengalaman – pengalaman menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan

yang hanya mungkin diperoleh dan berkembang dalam model pendidikan yang terbuka, demokratis, dan dialogis.

B. Demokrasi Pendidikan di Indonesia

Demokrasi pendidikan merupakan proses memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di dalam masyarakat tertentu. Pelaksanaan tersebut telah diatur dalam perundang – undangan yang berlaku di Indonesia seperti berikut ini:

1. Pasal 31 UUD 1945

- a. Ayat (1): tiap – tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
- b. Ayat (2): pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang – undang.

Dengan demikian, di negara Indonesia semua warga negara diberikan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan yang penyelenggaraan pendidikannya diatur oleh satu undang – undang sistem pendidikan

nasional, dalam hal ini tentu saja UU Nomor 2 tahun 1989.

2. Pasal 4 ayat 1 UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut UU tersebut, pendidikan diselenggarakan secara demokratis, adil, dan tidak diskriminatif dengan menjaga hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, dan nilai kebangsaan kemajemukan.

Demokrasi dalam dunia pendidikan memiliki konsekuensi bagi terbentuknya desentralisasi kewenangan, di mana pengelolaan pendidikan akan banyak ditentukan oleh pelaksana langsung, baik pengelola, tenaga kependidikan, maupun masyarakat dalam menciptakan isi (materi) sistem pembelajaran, termasuk pengembangan kualitas peserta didik. Di sisi lain, demokrasi pendidikan akan berdampak pula pada aspek kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan, serta pemerataan terhadap perolehan pendidikan masyarakat.

Konsekuensi penerapan demokrasi dalam pendidikan berarti menjamin mengembangkan kebebasan akademik. Artinya pola penyelenggaraan pendidikan harus dapat memberikan kebebasan kepada seluruh elemen pendidikan dalam mengemukakan pendapat dan menghargai perbedaan pendapat, sehingga masyarakat belajar akan terbiasa dengan pengembangan daya nalar yang kritis dan progresif.

Di Indonesia, penerapan demokrasi dalam dunia pendidikan dilandasi oleh adanya kesadaran akan keberagaman kondisi masyarakat, dimana sistem pengelolaan pemerintahan dalam menangani masalah pendidikan diarahkan pada prinsip desentralisasi.

Ada berbagai permasalahan dalam penerapan demokrasi pendidikan di Indonesia, yakni sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

Terjadinya krisis moneter sejak tahun 1998 lalu telah menciptakan laju inflasi yang

tak terkendalikan, sehingga daya beli masyarakat semakin menurun. Dampak terbesar dari fenomena ini adalah menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Padahal, krisis yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, bersumber dari rendahnya kualitas, kemampuan, dan semangat kerja. Secara jujur dapat kita katakan bahwa bangsa ini belum mampu mandiri dan terlalu banyak mengandalkan intervensi dari pihak asing. Meskipun agenda reformasi telah digulirkan untuk memperbaiki sendi-sendi kekuatan dengan menetapkan prioritas tertentu, hal tersebut belum berlangsung secara kaffah (menyeluruh).

Pendidikan sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas, kemampuan dan semangat kerja masyarakat, dalam kondisi bangsa Indonesia yang memiliki rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, secara inheren akan memberikan kondisi bangsa yang sulit untuk dapat keluar dari kendali krisis multi

dimensi. Terutama dalam hubungannya untuk membentuk budaya demokrasi dalam sistem kenegaraan kita. Peran pendidikan nampaknya masih dianggap sebagai ‘menara gading’ dalam segi kehidupan bermasyarakat, namun belum diupayakan sebagai bentuk investasi masa depan yang akan membentuk nilai-nilai hidup kemasyarakatan secara universalitas.

Rendahnya partisipasi pendidikan tentu akan membentuk rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga pemikiran kreatif, inovatif, dan progresif akan sukar untuk muncul dalam proses pembangunan bangsa dalam sistem kenegaraan demokrasi. Demikian pula halnya pola penyelenggaraan pendidikan akan cenderung sukar untuk menjiwai nilai-nilai demokratis, sehingga tidak akan menumbuhkan kondisi kebebasan metode pendidikan yang beragam, dan masih bersandar pada doktrinisasi sebagai wujud penerapan kebijakan sentralisir.

2. Rendahnya Inisiatif kebijakan yang demokratis.

Pemberlakuan demokrasi, baik dalam tatanan politik, ekonomi, maupun pendidikan, memberikan konsekuensi terhadap pembaruan kebijakan yang harus disesuaikan dengan perkembangan tuntutan mayoritas masyarakat. Dalam dunia pendidikan, system pendidikan nasional yang selama ini masih menginduk pada UU nomor 1989, dinilai sudah usang dan mengharapkan perubahan ke arah kebijakan yang lebih demokratis, khususnya pemberian kewenangan secara desentralisir.

Prinsip dasar diberlakukannya demokrasi pendidikan diarahkan pada terbentuknya partisipasi masyarakat di suatu wilayah untuk turut memikirkan dan mengejar kualitas pendidikan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Penerapan desentralisasi pendidikan terkait dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia sesuai UU nomor 22 dan 25 tahun

1999. Konsekuensi asas desentralisasi pendidikan yaitu berkembangnya penataan pendidikan local dalam membangun kemampuan masyarakat di sekitarnya, serta pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat yang diupayakan mampu berkiprah dalam pergaulan global.

3. Tantangan kehidupan Global.

Derasnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menghadapkan dunia pendidikan dalam situasi persaingan global. Sehingga berbagai kebijakan pendidikan diperlukan penyesuaian dengan standar kualitas universal. Kondisi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah, tentu dapat memberikan suasana penerapan pendidikan yang berbasis lokal (*education based local wisdom*), keadaan ini apabila tidak dapat ditata secara baik, akan memperparah kualitas pendidikan secara global. Oleh karena itu, prioritas kebijakan dalam era demokrasi, pendidikan diharapkan mampu mengolah potensi lokal dalam upaya

mensejajarkan diri dengan tuntutan kualitas global (*think globally at locally*).

Kelemahan pelaksanaan demokrasi dalam pendidikan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana berikut:

1. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pendidikan.

Secara umum, kondisi masyarakat dalam melihat peran pendidikan hanya sebatas strategi formalistik untuk memperoleh gelar tertentu. Di sisi lain, peran pendidikan pun masih belum banyak menyentuh terhadap kebutuhan masyarakat secara riil, sehingga pendidikan sering dinobatkan sebagai 'menara gading' di tengah keberadaan komunitas tertentu. Rendahnya kepedulian masyarakat terlihat dari menurunnya tingkat partisipasi terhadap standar kualitas yang diinginkan, baik secara fisik maupun bobot lulusan. Pendidikan sering dipandang hanya sebatas tanggung jawab pemerintah, padahal pendidikan yang bermutu sangat memerlukan peran aktif

seluruh komponen masyarakat, baik dalam segi perancangan kurikulum, materi pembelajaran, proses pendidikan, dan pembiayaan.

2. Rendahnya kualitas pemahaman demokrasi dalam pendidikan

Proses penyelenggaraan pendidikan masih menitikberatkan pada kondisi pembelajaran yang bersifat doktrinisasi. Hal tersebut banyak dipengaruhi oleh sistem sentralisasi kewenangan pada masa orde baru dalam membentuk sistem pendidikan sebagai komoditas politik dan ekonomi. Pada masa transisi dalam era reformasi, upaya memperbarui pola penyelenggaraan pendidikan ke arah demokrasi, nampaknya masih memerlukan waktu yang cukup lama, oleh karena dibutuhkan suatu langkah penyesuaian kebijakan sekaligus peran tenaga kependidikan dan manajemen sekolah yang mengerti terhadap prinsip dasar demokrasi pendidikan.

3. Rendahnya pembiayaan pendidikan.

Komponen masalah yang terbesar dalam mengejar kualitas pendidikan bertumpu pada faktor pembiayaan. Untuk menumbuhkembangkan kondisi pembaruan pendidikan ke arah demokrasi tentu memerlukan biaya yang cukup besar, baik bagi kepentingan peningkatan kualitas tenaga kependidikan, maupun sarana pendukung proses pembelajaran.



Evaluasi

1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi pendidikan?
2. Sebutkan dan jelaskan prinsip – prinsip demokrasi dalam pendidikan?

BAB 10

INOVASI PENDIDIKAN

A. Pengertian dan Hakikat Inovasi Pendidikan

Inovasi berasal dari kata latin, *innovation* yang berarti pembaharuan dan perubahan. Kata kerjanya *innovo* yang artinya memperbaharui dan mengubah. Inovasi ialah suatu perubahan yang baru yang menuju ke arah perbaikan, yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana (tidak secara kebetulan saja).

Istilah perubahan dan pembaharuan ada perbedaan dan persamaannya. Perbedaannya, kalau pada pembaharuan ada unsur kesengajaan. Persamaannya, yakni sama-sama memiliki unsur yang baru atau lain dari sebelumnya.

Kata “baru” dapat juga diartikan apa saja yang baru dipahami, diterima, atau dilaksanakan oleh si penerima inovasi, meskipun bukan baru lagi bagi orang lain. Namun, setiap yang baru itu belum tentu baik untuk setiap situasi, kondisi dan tempat.

Cara penggunaan potensi yang lama di dalam rangka meningkatkan efisiensi suatu usaha, juga dinamakan inovasi. Sebagai contoh, kalau kekurangan gedung dan guru, pemecahannya tidak selalu dengan menambahnya. Akan tetapi cara penggunaannya yang diperbaharui. Selama ini radio dipergunakan untuk menghibur para pendengar, sekarang umpamanya, sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi dan media pengajaran sehingga dengan biaya yang relatif murah dapat dicapai jumlah peserta didik yang lebih banyak.

Ibrahim mengemukakan bahwa inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode, yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi hasil seseorang atau kelompok orang (masyarakat), baik berupa hasil inversi (penemuan baru) atau discovery (baru ditemukan orang), yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan.

Demikian pula Ansuyar Nurtain mengemukakan inovasi adalah gagasan, perbuatan, atau sesuatu yang

baru dalam konteks sosial tertentu untuk menjawab masalah yang dihadapi.

Selanjutnya dijelaskan bahwa sesuatu yang baru itu, mungkin sudah lama dikenal, tetapi belum dilakukan perubahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah perubahan, tetapi tidak semua perubahan merupakan inovasi.

Sedangkan Peter M. Drucker mengemukakan lima prinsip inovasi yaitu:

1. Inovasi memerlukan analisa berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. artinya suatu inovasi hanya dapat terjadi kalau kita mempunyai kemampuan analisis.
2. Inovasi bersifat konseptual (bermula dari suatu keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang diterima masyarakat) dan perseptual (aktor inovasi mempunyai persepsi terhadap kebutuhan yang cocok bagi kondisi masyarakat).
3. Inovasi harus bersifat simpel (sederhana) dan terfokus (terarah).
4. Inovasi harus dimulai dari yang kecil.
5. Inovasi selalu diarahkan untuk menjadi suatu pelopor dari suatu perubahan yang diperlukan.

B. Tujuan Inovasi Pendidikan dan Cara Pencapaiannya

Menurut Santoso, tujuan utama inovasi yakni meningkatkan sumber-sumber tenaga, uang dan sarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi.

Tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas dan efektifitas : sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya, dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya (menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan), dengan menggunakan sumber, tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya.

Selain itu ada beberapa tujuan inovasi pendidikan, antara lain:

1. Pembaharuan (inovasi) pendidikan sebagai tanggapan baru terhadap masalah-masalah pendidikan.

Tugas pembaharuan pendidikan yang terutama adalah memecahkan masalah-masalah yang dijumpai dalam dunia pendidikan. Di antara masalah-masalah tersebut adalah:

- a. Kurang meratanya pelayanan pendidikan
- b. Kurang serasinya kegiatan belajar dengan tujuan.

- c. Belum efisien dan ekonomisnya pendidikan.
 - d. Kurang dihargainya unsur kebudayaan nasional.
 - e. Belum tersebarnya paket pendidikan yang memikat, mudah di cerna, dan mudah diterima
2. Sebagai upaya untuk memperkembangkan pendekatan yang lebih efektif dan ekonomis. Ada beberapa cara yang bisa ditempuh dalam upaya mencapai tujuan di atas yaitu:
- a. Cara pemerataan dan peningkatan kualitas, antara lain dengan meningkatkan kemampuan tenaga pengajar lewat peraturan memperlancar proses belajar anak didik, serta memantapkan nilai, sikap, keterampilan, dan kesadaran lingkungan pada anak didik.
 - b. Cara memperluas pelayanan pendidikan (kuantitas), antara lain dengan melalui penyebaran pesan-pesan yang merangsang kegiatan belajar dan partisipasi untuk ikut membangun, memberikan latihan keterampilan bagi mereka yang tidak pernah sekolah, dan lain-lain.
 - c. dengan cara meningkatkan keserasian pendidikan dengan pembangunan antara lain dengan

- menanamkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang fungsioanal untuk kehidupan di masyarakat.
- d.dengan cara meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem penyajian antara lain dengan mengusahakan isi, metode, dan bentuk pendidikan yang tepat guna, tepat saat, menarik, dan mengesankan.
- e.Dengan cara melancarkan sistem informasi kebijakan, antara lain dengan cara mengusahakan tersedianya saluran komunikasi dua arah yang cepat, kontinu dapat diandalkan serta terbuka demi kontrol dan partisipasi masyarakat

Kalau dikaji, arah tujuan inovasi pendidikan Indonesia tahap demi tahap, yaitu:

- a.Mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan-kemajuan ilmu dan teknologi sehingga makin lama pendidikan di Indonesia makin berjalan sejajar dengan kemajuan-kemajuan tersebut.
- b.Mengusahakan terselenggarakannya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga negara. misalnya meningkatkan daya tampung usia sekolah SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi.

Di samping itu, akan diusahakan peningkatan mutu yang dirasakan makin menurun dewasa ini. dengan sistem penyampaian yang baru, diharapkan peserta didik menjadi manusia yang aktif, kreatif, dan terampil memecahkan masalahnya sendiri. Tujuan jangka panjang yang hendak dicapai ialah terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya.

3. Masalah-Masalah Yang Menuntut Diadakan Inovasi

Adapun masalah-masalah yang menuntut diadakan inovasi pendidikan di Indonesia, yaitu:

- a. Perkembangan ilmu pengetahuan menghasilkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan kebudayaan bangsa Indonesia. Sistem pendidikan yang dimiliki dan dilaksanakan di Indonesia belum mampu mengikuti dan mengendalikan kemajuan-kemajuan tersebut sehingga dunia pendidikan belum dapat menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan yang terampil, kreatif, dan aktif sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat.
- b. Laju eksplosif (pertumbuhan) penduduk yang cukup pesat, yang menyebabkan daya tampung,

ruang dan fasilitas pendidikan yang sangat tidak seimbang. Pertambahan penduduk yang cepat berarti pula memerlukan pertambahan jumlah sekolah dan kebutuhan pendidikan lainnya seperti tenaga guru, buku-buku, fasilitas lainnya. Pertambahan penduduk yang cepat ini juga mengahruskan kita untuk bekerja lebih keras agar kebutuhan pendidikan anak usia sekolah dan pendidikan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga ekerja dapat dilaksanakan.

- c. Meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, sedangkan (di pihak lain) kesempatan sangat terbatas.
- d. Kualitas pendidikan yang dirasakan makin menurun, yang belum mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Belum mekarnya alat organisasi yang efektif, serta belum tumbuhnya suasana yang subur dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang dan yang akan datang. hal ini disebabkan karena

minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat untuk membangun diri ke arah kemajuan.

- f. Tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Salah satu tuntutan diadakannya inovasi pendidikan adalah adanya relevansi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja (profesi). Maka dari itu, selain diperoleh di sekolah, pendidikan dapat diperoleh di luar sekolah.

4. Berbagai Contoh Upaya Inovasi Yang Telah Dilaksanakan

a. Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP)

PPSP adalah salah satu proyek dalam rangka program pendidikan yang ditugaskan untuk mengembangkan satu sistem pendidikan dasar dan menengah (Surat Keputusan Menteri No. 0141 Tahun 1974) yang ;

- 1) Efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan individu yang diwujudkan melalui program pendidikan yang sesuai,
- 2) Merupakan dasar bagi pendidikan seumur hidup, dan

- 3) Efisien dan realitas, sesuai dengan tingkat kemampuan pembiayaan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Dalam surat keputusan itu terdapat beberapa pokok pikiran mengenai hakikat Sekolah Pembangunan, yang menyangkut relevansi sekolah dengan masyarakat, yaitu:

- 1) Adanya integrasi antara sekolah dan masyarakat serta pembangunan.
- 2) Sekolah menghasilkan tenaga terdidik sehingga dapat merupakan tenaga kerja yang produktif.
- 3) Sekolah menghasilkan manusia terdidik dengan pengertian kesadaran ekologi, baik lingkungan sosial, fisik maupun biologis.
- 4) Sekolah menyelenggarakan pendidikan yang menyenangkan, merangsang sesuai dengan tuntutan zaman untuk pendidikan watak, pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, kemampuan berkomunikasi dan kesadaran ekologi.
- 5) Sekolah menciptakan keseimbangan fisik, emosional, intelektual, kultural dan spiritual, serta keseluruhan pembangunan masyarakat.

6) Sekolah memberikan sumbangan bagi ketahanan nasional dan ikut serta dalam pembangunan masyarakat.

b. Pengajaran dengan Sistem Modul

Modul ialah suatu satuan program belajar mengajar yang dapat dipelajari oleh murid dengan bantuan yang minimal dari pihak guru. Satuan ini berisikan tujuan yang harus dicapai secara praktis, petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan, materi dan alat-alat yang dibutuhkan, alat penilaian guru yang mengukur keberhasilan murid dalam mengerjakan modul.

Modul merupakan program pengajaran mengenai suatu satuan bahasan yang sengaja disusun secara sistematis, operasional dan terarah untuk digunakan oleh anak didik. Modul ini disertai pula pedoman penggunaannya untuk guru. Sistem modul ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas belajar mengajar di sekolah.

1) Prinsip Pengajaran Modul

Ada empat prinsip yang perlu mendapat perhatian, yaitu keaktifan siswa, perbedaan individual siswa, siswa harus memecahkan

masalah (*problem solving*), dan *continuous progress*. Kalau seorang siswa sudah siap dengan sebuah modul, dia dapat pindah ke modul berikutnya tanpa menunggu siswa yang belum siap, dan siswa dapat menilai sendiri terhadap segala yang dikerjakan siswa selama belajar (*self-evaluation*).

2) Komponen Modul

Modul terdiri dari komponen-komponen, petunjuk guru, lembar kerja siswa, lembaran kegiatan siswa, kunci lembaran kerja, lembaran tes, dan kunci jawaban tes. Sejak tahun 1979 komponen modul berubah menjadi petunjuk guru, di belakangnya dilampirkan kunci jawaban tes, petunjuk siswa, lembaran kegiatan siswa, jawaban tugas, dan lembaran tes.

3) Peran Guru dan Siswa

Guru sebagai pengelola kegiatan belajar mengajar di kelas, yaitu;

- a) memberikan penjelasan kepada siswa mengenai modul itu sebelum mereka mulai mengerjakannya.

- b) mengawasi kegiatan belajar siswa selama pelajaran berlangsung.
- c) memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa sesuai dengan perbedaan masing-masing siswa. Dengan kata lain, memberikan pengayaan kepada siswa yang cepat (cerdas) dan memberikan remedial kepada siswa yang lamban (kurang cerdas).
- d) memberikan penilaian terhadap hasil belajar siswa, dan
- e) menentukan program yang akan diikuti siswa selanjutnya.

Dengan sistem ini, siswa mendapat kesempatan untuk belajar sendiri, sedangkan tugas guru hanya mengorganisasi dan mengatur proses belajar.

c. Proyek Pamong

Proyek ini merupakan program pendidikan bersama antara pemerintah Indonesia dan *Innotech*, lembaga yang didirikan oleh badan kerjasama Menteri-menteri pendidikan se-Asia Tenggara. Di kalangan organisasi menteri pendidikan negara-negara Asia tenggara (*South*

East Asian Ministers Education Organization atau Seameo) proyek ini dikenal dengan istilah Impact (*Intruccion of Management by Parent Community and Teachers*)

Pamong singkatan dari Pendidikan Anak oleh Masyarakat, Orang Tua, dan Guru. Proyek ini diujicobakan di tingkat sekolah dasar pada Kecamatan Kebakramat (Kelurahan Alastimo, Banjarharjo, Malanggaten, dan Kebak) di Kabupaten Karanganyar Solo.

Tujuan proyek pamong ini adalah;

- 1) Membantu anak-anak yang tidak sepenuhnya dapat mengikuti pendidikan sekolah. Atau membantu siswa yang *droup-out*.
- 2) Membantu anak-anak yang tidak mau terikat oleh tempat dan waktu dalam belajar, oleh karena dapat belajar sambil menggembalakan ternak, waktu istirahat, dan lain-lain.
- 3) Mengurangi penggunaan tenaga guru sehingga rasio guru terhadap murid dapat menjadi 1:200. pada SD biasa 1:40 atau 1:50.

- 4) Dengan meningkatkan pemerataan kesempatan belajar, dengan pembiayaan yang sedikit dapat ditampung sebanyak mungkin siswa.

Dengan kata lain, tujuan proyek pamong untuk menentukan alternatif sistem penyampaian pendidikan dasar yang bersifat efektif, ekonomis, dan merata, yang sesuai dengan kondisi kebanyakan daerah di Indonesia.

Jadi dengan sistem Pamong ini anak-anak/siswa dapat belajar sendiri dengan bimbingan tutor (seorang siswa yang lebih tinggi tingkat belajarnya), atau anggota masyarakat, serta bimbingan orang tua. Pengajaran yang diberikan memperhatikan kesanggupan anak dengan menggunakan modul yang diambil dari Pusat Pendidikan Masyarakat (Pusdikmas). Proyek eksperimentasi itu berakhir pada tahun 1976.

d.SMP Terbuka (SMPT)

SMPT adalah Sekolah Menengah Umum Terbuka Tingkat Pertama, yang kegiatan belajarnya sebagian besar diselenggarakan di luar gedung sekolah dengan cara penyampaian pelajaran

melalui berbagai media dan interaksi yang terbatas antara guru dan murid.

Latar belakang berdirinya SMPT terbuka adalah (a) kekurangan fasilitas pendidikan dan tempat belajar, (b) tenaga pendidikan yang tidak cukup, (c) memperluas kesempatan belajar dalam rangka pemerataan pendidikan, dan (d) menanggulangi anak terlantar yang tidak diterima di SMP Negeri. Dalam penyelenggaraannya SMPT ditunjuk beberapa SMP Negeri atau Swasta sebagai SMP induk.

Tujuan SMPT sama dengan tujuan pendidikan umum SMP. Sedangkan ciri-cirinya adalah; (a) terbuka bagi siswa tanpa pembatasan umur dan tanpa syarat-syarat akademis yang ketat, (b) terbuka dalam memilih program belajar untuk mencapai ijazah formal, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jangka pendek yang bersifat praktis, insidental dan perorangan, (c) terbuka dalam proses belajar-mengajar tidak selalu diselenggarakan di ruang kelas secara tatap muka, melainkan dapat juga melalui media, seperti radio, media cetak, kaset, slide, model dan gambar-

gambar, (d) terbuka dalam mengelola sekolah. Sekolah boleh dikelola siapa saja misalnya pegawai negeri, masyarakat dan lain-lain.

Kurikulum SMPT merupakan kurikulum SMP 1975 bidang studinya; Bahasa Indonesia, PMP, Matematika, IPA, IPS, Baha Inggris, Agama, Keterampilan, Olah raga dan Kesehatan.

Selain SMP terbuka juga ada Universitas terbuka yang pelaksanaannya tidak jauh dengan SMP terbuka.

e. Televisi Pendidikan

Di tengah maraknya perkembangan pertelevisian di Indonesia, maka dunia pendidikanpun berkeinginan memanfaatkan televisi tersebut sebagai media dalam pelaksanaan pendidikan. Seperti pernah ditayangkan TPI pada tahun 1992 dimana ada program mata pelajaran Bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, Biologi, dan lain-lain, namun siaran itu kemudian tidak berlanjut.

f. Sekolah Unggulan

Salah satu tujuan sekloalah unggulan adalah menjaring dan sekaligus mengembangkan kader

bangsa yang baik, dalam artian memiliki kelebihan dalam berbagai aspek dibandingkan dengan kader-kader bangsa pada umumnya, sehingga ia mampu mengantisipasi dan menjawab berbagai tantangan zaman.

g. Pembaharuan sistem pendidikan

Pembaharuan sistem pendidikan bisa dilaksanakan dengan berbagai cara misalnya pembaharuan dalam bidang:

1) Pembaharuan Kurikulum

Dari mulai pertama pendidikan menggunakan kurikulum 1975 yang disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri yang terkenal dengan SKB Tiga Menteri secara nasional dilaksanakan bertahap mulai tahun pengajaran 1976 dengan catatan, bahwa bagi sekolah-sekolah yang menurut penilaian kepala perwakilan telah mampu, diperkenankan melaksanakannya mulai tahun 1975. Kemudian kurikulum ini dianggap kurang relevan dengan perubahan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat, maka di perbaharui dengan kurikulum 1984. Perbaikan

kurikulum ini dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0461/U/1983 Tahun 1983 Tanggal 23 Oktober. Pembinaan kurikulum ini diharapkan dapat memberikan peluang yang lebih besar kepada siswa untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Kemudian diperbaharui lagi dengan kurikulum 1994. untuk memperbaiki mutu pendidikan selama pemerintahan Orde Baru. Ciri yang membedakan Kurikulum 1994 dengan kurikulum sebelumnya, ada pada pelaksanaan tentang pendidikan dasar sembilan tahun, memberlakukan kurikulum muatan lokal serta penyempurnaan tiga kemampuan dasar, membaca, menulis dan menghitung (3 M) yang fungsional. Kemudian di era reformasi sekarang ini kurikulum disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yaitu dengan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi.

Pengembangan kurikulum diadakan secara bertahap, dalam arti bahwa upaya pemantapan tetap diadakan secara terus menerus. hal ini

penting, mengingat kurikulum harus selalu disesuaikan dengan tahap pembangunan nasional melalui penyempurnaan isi, bentuk, dan cara penyajian pendekatan yang lebih sesuai.

2)Pembaharuan Pengelolaan Institusional

Dalam mengelola lembaga pendidikan bisa dilaksanakan dengan berbagai cara, yang selama ini hanya menggunakan manajemen konvensional saja, sekarang bisa menggunakan manajemen berbasis sekolah atau yang lain dalam mengelola lembaga pendidikan, karena dengan MBS yang bertumpu pada *stake holder* (sekolah, Masyarakat dan pemerintah) lembaga bisa mempunyai wewenang yang lebih luas di dalam mengambil keputusan.

3)Pembaharuan UU. Sistem Pendidikan Nasional

Mulai tahun 1989 Indonesia menggunakan UU. No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional, namun sekarang tahun 2003 beralih dengan menggunakan UU. sistem Pendidikan nasional yang baru ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2003.

h. Pendekatan Dalam Proses belajar Mengajar

Dalam proses belajar mengajar bisa menggunakan berbagai cara, bisa menggunakan pendekatan keterampilan proses yang diwujudkan dalam bentuk belajar siswa aktif (CBSA). Pada dasarnya pendekatan ini memberikan penekanan yang sama beratnya bagi proses belajar dengan hasil belajar. Dengan demikian proses belajar mengajar lebih banyak mengacu pada bagaimana seseorang belajar, selain apa yang dia pelajari tanpa mengabaikan ketuntasan belajar dengan memperhatikan kecepatan belajar siswa. Pada dasarnya pelaksanaan proses belajar mengajar ini berbentuk kelompok tanpa menutup kemungkinan untuk bentuk lainnya.

Sedangkan metode belajar yang dipergunakan sekarang bisa menggunakan Quantum Learning dan metode mengajar guru bisa menggunakan quantum teaching.



Evaluasi

1. Sebutkan tiga contoh inovasi pendidikan?
2. Mengapa inovasi pendidikan menjadi kebutuhan penting dalam dunia pendidikan??

BAB 11

TOKOH – TOKOH PENDIDIKAN

A. Ki Hajar Dewantara

1. Biografi Singkat



Ki Hajar
Dewantara
terlahir dengan
nama Raden
Mas Soewardi
Soerjaningrat.
Beliau lahir di
Kota
Yogyakarta,

pada tanggal 2 Mei 1889. Hari kelahirannya kemudian diperingati setiap tahun oleh Bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara terlahir dari keluarga bangsawan maka beliau berhak memperoleh pendidikan untuk para kaum bangsawan. Ia pertama kali bersekolah di ELS

yaitu Sekolah Dasar untuk anak-anak Eropa/dan melanjutkan pendidikan kedokterannya di STOVIA (*School tot Opleiding van Indische Artsen*) meskipun tidak sampai tamat lantaran sakit.

Semasa hidupnya, Ki Hajar Dewantara cenderung lebih tertarik dalam dunia jurnalistik atau tulis - menulis, hal ini dibuktikan dengan bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar pada masa itu. Berdirinya organisasi Budi Utomo sebagai organisasi sosial dan politik kemudian mendorong Ki Hajar Dewantara untuk bergabung di dalamnya.

Pada tahun 1919, ia kembali ke Indonesia dari pengasingan dan langsung bergabung sebagai guru di sekolah yang didirikan oleh saudaranya. Pengalaman mengajar yang ia terima di sekolah tersebut kemudian digunakannya untuk membuat sebuah konsep baru mengenai metode pengajaran pada sekolah yang ia dirikan sendiri pada tanggal 3 Juli 1922. Sekolah

tersebut bernama *Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa* yang kemudian kita kenal sebagai Taman Siswa. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Di tengah keseriusannya mencurahkan perhatian dalam dunia pendidikan di Taman Siswa, ia juga tetap rajin menulis. Namun tema tulisannya beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Tulisannya berjumlah ratusan buah. Melalui tulisan-tulisan itulah dia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Setelah zaman kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Nama Ki Hajar Dewantara bukan saja diabadikan sebagai seorang tokoh dan pahlawan pendidikan (bapak Pendidikan Nasional) yang tanggal kelahirannya 2 Mei

dijadikan hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional melalui surat keputusan Presiden RI No.305 Tahun 1959, tanggal 28 November 1959. Penghargaan lain yang diterimanya adalah gelar *Doctor Honoris Causa* dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1956. Dua tahun setelah mendapat gelar *Doctor Honoris Causa* itu, ia meninggal dunia pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di pemakaman keluarga Taman Siswa Wijaya Brata, Yogyakarta.

2. Pemikiran Ki Hajar Dewantara

Dalam penyelenggaraan Taman Siswa, ada lima asas pemikiran yang disebut Panca Darma yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu:

a. Asas Kodrat Alam

Asas ini berkaitan dengan hakekat dan kedudukan manusia sebagai makhluk hidup di dunia, agar senantiasa mengatur dan menempatkan diri dalam hubungannya yang harmonis dengan

alam dan lingkungan sekitar. Keharmonisan hubungan tersebut akan mendukung tercapainya kesejahteraan. Sebaliknya, jika terjadi pertentangan, maka akan mengarah kepada kehancuran harkat manusia. Kesadaran manusia akan hakikat dan dan kedudukannya di dunia ini, niscaya akan memperkokoh pijakan bagi dirinya dalam berbuat positif demi masa depannya. Sebaliknya, kekeliruan dalam menghadapi dunia ini, akan berujung kepada kesesatan atau kekeliruan yang bersangkutan dalam usaha memperoleh keberhasilan hidup. Menurut Ki Hajar Dewantara, pada hakekatnya manusia sebagai makhluk Tuhan adalah satu dengan kodrat alam ini. Artinya, manusia merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan jagad raya ciptaan Tuhan.

b. Asas Kemerdekaan

Inti dari pandangan ini adalah bahwa manusia dilahirkan ke dunia dalam

keadaan bebas merdeka, dalam arti memiliki hak asasi yang bersifat asli untuk hidup dan menyelenggarakan kehidupannya. Tak seorangpun bisa memaksakan kehendak atau kekuasaanya terhadap orang lain, yang berarti menodai kebebasan individu manusia di muka bumi ini. Padahal, kebebasan dan kemerdekaan itu merupakan anugerah dari Tuhan, sehingga tidaklah pantas bila ada pihak tertentu yang ingin mencabutnya.

c. Asas Kebudayaan

Salah satu ciri dari kemajuan individu atau masyarakat dapat dilihat dari corak dan mutu kebudayaan yang berhasil diciptakan dan sekaligus merupakan bagian integral dari realitas kehidupan individu atau masyarakat tertentu. Oleh karena itu, bagi suatu bangsa, sangat penting sekali adanya usaha memelihara dan mengembangkan budaya individu dan masyarakatnya. Dengan demikian,

menjadi salah satu pembentuk identitas bangsa sekaligus pembeda dengan bangsa lain. Kebudayaan suatu bangsa juga merupakan cermin kemajuan dan keberhasilan bangsa itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pelestarian dan pengembangan kebudayaan suatu bangsa tidak berarti hanya memelihara dan melindunginya dari pengaruh luar.

d. Asas Kebangsaan

Sudah sedemikian lazimnya bahwa setiap bangsa di dunia ini mencintai dan memegang teguh ikatan kenegaraan dan kebangsaannya. Hal yang demikian ini bukanlah buruk, karena di sana terkandung realitas dan makna persatuan sebagai modal keberhasilan perjuangan bangsa. Tanpa adanya kebanggaan akan identitas kebangsaan, jelas tidak mungkin dicapai keberhasilan dan persatuan, bahkan sebaliknya bisa mengarah kepada pertikaian antar kelompok tertentu atau malah kehancuran bangsa itu sendiri.

Akan tetapi, jangan sampai cinta kebangsaan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Asas kebangsaan harus menampilkan bentuk perbuatan yang nyata, jangan sampai mengarah kepada permusuhan terhadap bangsa lain. Pada lingkup bangsa sendiri, asas tersebut antara lain mendorong rasa persatuan antar kelompok yang ada, juga persatuan dalam kehendak maupun cita-cita untuk mencapai kebahagiaan hidup lahir batin bagi seluruh komponen bangsa.

e. Asas Kemanusiaan

Seluruh dharma, usaha atau pengabdian manusia di tengah perjalanan hidup ini, pada hakikatnya adalah untuk kepentingan harkat dan martabat kemanusiaan. Sebagai layaknya manusia baik secara individual maupun sosial, ia akan berupaya sekuat tenaga agar hajat dan kebutuhan hidup manusiawinya terpenuhi secukupnya. Selama kebutuhan

manusiawi tersebut belum terpenuhi, maka perjuangan akan terus berlangsung.

Meskipun Ki Hajar Dewantara belajar ilmu kependidikan di barat, dia tidak mau menerapkan sistem pendidikan barat di Indonesia. Sistem barat dipandanginya tidak cocok karena dasar-dasarnya adalah perintah, hukuman dan ketertiban yang bersifat paksaan. Pendidikan model ini, menurut Ki Hajar Dewantara, merupakan upaya sistematis dalam perkosaan terhadap kehidupan batin anak-anak. Hal itu jelas berbahaya bagi perkembangan budi pekerti anakanak sebab pendidikan demikian tidak membangun budi pekerti anak-anak, melainkan merusaknya. Menurut Ki Hajar Dewantara, cara mendidik semacam itu tidak akan bisa membentuk seseorang hingga memiliki “kepribadian”. Paksaan dan hukuman dalam proses pendidikan yang kadangkala tidak setimpal dengan kesalahan anak didik bukannya memperkuat mentalitas anak-anak,

melainkan memperlemahnya di kemudian hari. Anak tidak menjadi pribadi yang mandiri, tidak memiliki inisiatif, tidak kreatif. Dalam kehidupan nyata ia tidak dapat bekerja kalau tidak dipaksa dan diperintah. Jadi, produk pendidikan barat, di hadapan Ki Hajar Dewantara, adalah manusia-manusia pasif yang dangkal kesadarannya untuk berkreasi secara mandiri.

Metode pendidikan yang cocok dengan karakter dan budaya orang Indonesia menurutnya yakni tidak memakai syarat paksaan. Orang Indonesia adalah termasuk ke dalam bangsa timur. Bangsa yang hidup dalam khasanah nilai-nilai tradisional berupa kehalusan rasa, hidup dalam kasih sayang, cinta akan kedamaian, ketertiban, kejujuran dan sopan dalam tutur kata dan tindakan. Nilai-nilai itu disemai dalam dan melalui pendidikan sejak usia dini anak. Dalam praksis penyemaian nilai-nilai itu, pendidik menempatkan peserta didik

sebagai subyek, bukan obyek pendidikan. Artinya, peserta didik diberi ruang yang seluasnya untuk melakukan eksplorasi potensi-potensi dirinya dan kemudian berekspresi secara kreatif, mandiri dan bertanggungjawab.

Berangkat dari keyakinan akan nilai-nilai tradisional itu, Ki Hajar Dewantara yakin pendidikan yang khas Indonesia haruslah berdasarkan citra nilai Indonesia juga. Maka ia menerapkan tiga semboyan pendidikan yang menunjukkan kekhasan Indonesia, yakni : Pertama, *Ing Ngarsa Sung Tuladha*, artinya seorang guru adalah pendidik yang harus memberi teladan. Ia pantas *digugu* dan ditiru dalam perkataan dan perbuatannya. Kedua, *Ing Madya Mangun Karsa*, artinya seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah - tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide - ide mereka untuk berkarya. Ketiga, *Tut Wuri Handayani*, artinya seorang guru adalah pendidik yang

terus-menerus menuntun, menopang dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya.

Senada dengan semboyan pendidikan di atas adalah metode pendidikan yang dikembangkan, yang sepadan dengan makna “paedagogik”, yakni *Momong*, *Among* dan *Ngemong*, yang berarti bahwa pendidikan itu bersifat mengasuh. Mendidik adalah mengasuh anak dalam dunia nilai-nilai. Praksis pendidikan dalam perspektif ini memang mementingkan ketertiban, tapi pelaksanaannya bertolak dari upaya membangun kesadaran, bukan berdasarkan paksaan yang bersifat “hukuman”. Maka, pembagian usia 0-7, 7-14, dan 14-21 dalam proses pendidikan yang digagas Ki Hajar Dewantara bukan tanpa landasan pedagogik. Pembagian demikian berdasarkan fase – fase di mana masing-masing menuntut peran pendidik dengan isi dan nilai yang berbeda-beda. Metode *Ngemong*, *Momong*, *Among* dan semboyan

Ing ngarso sung tulodho, Ing Madya mangun karsa, dan Tut wuri handayani bukan berasal dari sebuah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terpisah. Pendidikan bukan hanya masalah bagaimana membangun isi (kognisi) namun juga pekerti (afeksi) anak-anak Indonesia, yang tentunya diharapkan “meng-Indonesia” agar mereka kelak mampu menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang “meng-Indonesia” (memiliki kekhasan Indonesia).

B. Al – Ghazali

1. Biografi Singkat



Nama lengkap Al-Ghazali adalah Muhammad bin Muhammad, mendapat gelar Imam besar Abu Hamid Hujjatul Islam yang

dilahirkan pada tahun 450 H/ 1085 M, di suatu kampung Ghazalah, Thusia, suatu kota

di Khurasan, Persia. Ia keturunan Persia dan mempunyai hubungan keluarga dengan raja-raja saljuk yang memerintah daerah Khurasan, Jibal, Irak, Persia, dan Ahwaj. Ayahnya seorang miskin yang jujur, hidup dari usaha mandiri, bertenun kain bulu dan ia sering kali mengunjungi rumah 'Alim ulama, menuntut ilmu dan berbuat jasa kepada mereka. Ayah Al-Ghazali sering berdo'a kepada Allah agar diberikan anak yang pandai dan berilmu. Akan tetapi belum sempat menyaksikan (menikmati) jawaban Allah atas do'anya, ia meninggal dunia pada saat putera idamannya masih usia anak - anak.

Al-Ghazali mempunyai seorang adik yang bernama Ahmad, keduanya menjadi ulama besar dan pengagum serta pecinta ilmu. Berkat bantuan seorang sufi sederhana dengan sedikit harta yang diwariskan oleh orang tuannya, Al-Ghazali dan saudaranya memasuki Madrasah Tingkat Dasar (Madrasah Ibtidaiyah) dengan memahami ilmu-ilmu dasar. Gurunya yang utama di

madrasah itu adalah Yusuf Al-Nassaj, seorang sufi yang kemudian disebut juga dengan nama Imam Al-Haramain, Al-Nassajlah yang pertama kali meletakkan dasar-dasar pemikiran sufi pada diri Al-Ghazali.

Al-Ghazali mempelajari ilmu fiqh, mantiq, dan ushul. Ia pun mempelajari antara lain : filsafat dari risalah-risalah ikhwanusshofa karangan Al-Farabi dan Ibnu Maskawaih, sehingga melalui ajaran-ajaran ahli filsafat itu, Al-Ghazali dapat menyelami faham-faham Aristoteles dan pemikir Yunani yang lain. Ia pun mempelajari ajaran Islam dari imam Syafi'i, Haramlah, Jambad, Al-Muhasibi, dan lain-lain. Al-Ghazalipun berguru pada imam Abu Ali Al-Faramzi, murid Al-Qusyairi yang terkenal dan shabat Al-Subkhi, ia memiliki jasa yang besar dalam mengajar ilmu tasawuf pada Al-Ghazali. Suatu ketika, Al-Ghazali ikut serta dalam perdebatan dengan sekumpulan ulama dan para intelek yang dihadiri oleh Nidham AlMulk. Berkat penguasaan himat wawasan ilmu yang luas, kelancaran

berbahasa dan kekuatan argumentasinya. Al-Ghazali berhasil memenangkan perbedaan ilmiah itu. Kemampuannya itu dikagumi Nizham Al-Mulk, sehingga menteri ini berjanji akan mengangkatnya menjadi guru pada sekolah yang didirikannya di Baghdad. Rangkaian peristiwa yang bersejarah bagi Al-Ghazali ini terjadi pada tahun 484 H, atau 1091 M.

Pada usia 33 tahun, Al-Ghazali diangkat menjadi Profesor pada Universitas Nizhamiyah di Baghdad, dan ia memperoleh suatu kedudukan yang tinggi dalam dunia ilmu pengetahuan pada masanya. Nizhamul Mulk makin tertarik dengan kemampuan Al-Ghazali, maka diundangnya Al-Ghazali supaya pindah ke Mu'askar, tempat kediaman perdana menteri itu dan tempat tinggal pembesar-pembesar Negara serta ulama dalam bagian ilmu.

Al-Ghazali dikenal sebagai tokoh yang agung, mudah mempunyai martabat tinggi dan populer, di samping setiap ucapan dan

tulisannya mudah disimak, bahkan pada zamannya tidak ada yang menandinginya. Namun kemasyhuran yang diperolehnya itu ditinggalkan begitu saja oleh Al-Ghazali. Ia keluar dari lingkaran Nazhamiyah menuju Baitullah di Mekkah untuk menunaikan ibadah haji tepatnya tahun 448 H. Sepulang dari Mekkah, Al-Ghazali menuju Damaskus, di sana ia berkontemplasi di menara Barat, di sebuah mesjid jami' bahkan menetap disana pula. Keadaan ini berlangsung selama sepuluh tahun sejak pindah ke Damsyik. Dalam masa ini ia menuliskan buku-buku yang dikenal diantaranya *Ihya 'Ulum Al-Din*. Karena desakan penguasa yaitu Muhammad, saudara Barkijaruk Al-Ghazali mau kembali mengajar di sekolah Nizhamiyah di Naisabur pada tahun 499 H, tetapi pekerjaan ini hanya berlangsung dua tahun. Akhirnya ia kembali ke kota Thus lagi. Di sana ia mendirikan sebuah sekolah untuk para *fuqaha* dan sebuah biara untuk para *Mutawassifin*. Di kota itu

pula ia meninggal dunia pada tahun 505 H / 111 M/ dalam usia 54 tahun.

2. Pemikiran Al-Ghazali

Al-Ghazali pernah berkata: “hasil dari ilmu sesungguhnya ialah mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan semesta alam, dan menghubungkan diri dengan para malaikat yang tinggi dan bergaul dengan alam arwah, itu semua adalah kebesaran, pengaruh, pemerintahan bagi raja-raja dan penghormatan secara naluri.” Selanjutnya dari kata-kata berikut dapat diartikan bahwa tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali dapat dibagi menjadi dua bagian, tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek sebagaimana berikut:

a. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan pendidikan jangka panjang ialah pendekatan diri kepada Allah. Pendidikan dalam prosesnya harus mengarahkan manusia menuju pengenalan dan kemudian pendekatan diri kepada Tuhan pencipta alam. Selanjutnya Al-Ghazali

mengutip sebuah hadis sebagai berikut.
"barang siapa menambah ilmu (keduniawian) tetapi tidak menambah hidayah, ia tidak semakin dekat dengan Allah, dan justru semakin jauh dari-Nya."
(H.R. Dailami). Menurut konsep ini, dapat dinyatakan bahwa semakin lama seseorang duduk dibangku pendidikan, semakin bertambah ilmu pengetahuannya, maka semakin mendekat kepada Allah. Tentu saja, untuk menentukan itu tujuan itu bukanlah sistem pendidikan sekular yang memisahkan antara ilmu - ilmu keduniaan dari nilai - nilai kebenaran dan sikap religius, juga bukan sistem Islam yang konservatif. Tetapi, sistem pendidikan yang integral. Sistem inilah yang dapat membentuk manusia melaksanakan tugas-tugas kekhilafahan.

b. Tujuan Jangka Pendek

Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan jangka pendek ialah diraihnya profesi manusia sesuai dengan bakat dan

kemampuannya. Selanjutnya Al-Ghazali juga menyinggung masalah pangkat, kedudukan, kemegahan, popularitas, dan kemuliaan dunia secara naluri. Semua itu bukan merupakan tujuan dasar seseorang yang melibatkan diri di dunia pendidikan. Seorang penuntut ilmu, seorang yang terdaptar sebagai peserta didik, mahapeserta didik, dosen, guru dan sebagainya, mereka akan memperoleh derajat, pangkat, dan segala macam kemuliaan hendak meningkatkan kualitas dirinya melalui ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu untuk diamalkan. Karena itulah, Al-Ghazali bahwa langkah seseorang dalam belajar adalah untuk mensucikan jiwa dari kerendahan budi dan sifat-sifat tercela, dan motivasi pertama adalah untuk menghidupkan syariat dan misi Rasulullah, bukan untuk mencari kemegahan duniawi, mengejar pangkat, atau popularitas.

Dari pemaparan diatas dapatlah disimpulkan bahwa tujuan pendidikan menurut AL-Ghazali adalah

- a. Tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara kepada pendekatan diri kepada Allah;
- b. Tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

C. John Dewey

1. Biografi Singkat



John Dewey
dilahirkan di
Burlington,
Vermont pada
tanggal 20
Oktober 1859
sebagai anak
seorang pemilik
toko. Dia

menikah dengan Alice Chipman dan dikaruniai 4 orang anak. Sebagai profesor filsafat di Chicago, ia juga memimpin bagian

pedagogik dan mendirikan suatu sekolah untuk menguji dan mempraktekan teorinya. Sekolah yang didirikan Dewey bukanlah suatu sekolah model, melainkan sekolah percobaan yang digabungkan pada universitasnya di Chicago.

Sekitar tahun 1904 sampai 1931 dia meninggalkan universitas tersebut, lalu pergi ke Universitas Colombia di New York. Ketika mengajar di Universitas Colombia, ia mempunyai banyak waktu luang untuk melakukan penelitian dan melakukan perjalanan ke Eropa dan Asia. Dia mengunjungi Cina dan Jepang, pertemuan tersebut sangatlah penting terlebih ketika ia di Japan memberikan penyuluhan mengenai Reconstruction in philosophy (merekonstruksi filsafat). Pada tahun 1924 Dewey mengunjungi Turki, dimana ia membuat organisasi *Turkish Educational System*. Dua tahun kemudian saat musim panas dia bergabung dengan Universitas Mexico. Pada tahun 1928 dia mengunjungi

Rusia dan melakukan perbaikan sistem pendidikan disana. Dewey tinggal di New York lebih dari 40 tahun sampai dia pensiun dari mengajar dalam tahun 1930. Pada tahun 1952, ia meninggal di New York.

2. Pemikiran John Dewey.

Agar dapat memahami pendirian Dewey mengenai pendidikan dan pengajaran perlu diketahui tentang dasar-dasar pokok dari pandangan hidupnya yang meliputi beberapa teori diantaranya:

- a. Dasar pokok dari filsafat diyakininya adalah teori evolusi Darwin yang mengatakan bahwasannya hidup ini dinamis dan tidak statis. Dari sini John Dewey menarik kesimpulan bahwa letak puncak kemajuan itu tidak dapat diketahui terlebih dahulu, tetapi terletak dihari kemudian dan bergantung pada kemajuan masyarakat tiap masa.
- b. John Dewey merupakan penganut teori pragmatisme, benar tidaknya suatu teori tergantung pada berfaedah dan tidaknya

teori bagi manusia dalam kehidupannya. Sesuai dengan hal itu maka tujuan kita berfikir adalah memperoleh hasil fikir yang dapat membawa hidup kita lebih maju dan lebih berguna. Penilaian tentang benar tidaknya sesuatu tergantung pada guna atau manfaatnya untuk masyarakat serta kemajuan.

- c. Dalam kejiwaan, ia menganut teori behaviorisme (tingkah laku) yang berasumsi bahwa kehidupan jiwa digerakkan dari luar, tidak dari dalam. Tiap perbuatan atau tingkah laku manusia adalah reaksi (respons) atas rangsangan (stimulus) dari luar, dan perbuatan manusia itu selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Pandangan-pandangan John Dewey terhadap pendidikan secara umum adalah upaya redefinisi pendidikan dan tujuan umum pendidikan itu sendiri. Definisi pendidikan menurut John Dewey diinterpretasikan sebagai suatu bentuk

proses, dimana masyarakat berusaha mengenal dirinya. Dengan kata lain pendidikan merupakan proses agar masyarakat menjadi survival untuk menjadi kekal dan abadi.

Secara khusus rekomendasi John Dewey terhadap pendidikan mencakup dua hal yaitu metode pendidikan dan kurikulum. *Pertama* adalah metode pendidikan, yang mana menurut John Dewey adalah upaya menanamkan disiplin, tetapi bukan otoritas. Hal terpenting adalah mengontrol anak dari eksternal. Metode pengajaran dengan disiplin berarti seorang mengarahkan pelajaran dengan disiplin dengan cara: (1) membuang segala bentuk paksaan dalam proses pendidikan; (2) memunculkan minat peserta didik melalui proses intimisasi guru dengan kecakapan dan minat setiap murid; (3) penciptaan suasana kelas yang partisipatif sehingga setiap elemen kelas turut berpartisipasi dalam proses belajar. *Kedua* adalah kurikulum, di mana menurut Dewey

kurikulum tergantung pada definisinya tentang pendidikan dan pandangannya tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah meningkatkan lembaga-lembaga yang membentuk masyarakat. Sedangkan isi pendidikan adalah mata pelajaran yang memberikan *impulse* kepada anak didik. Isi tersebut meliputi menejemen dan pelaksanaan semua materi pelajaran.

Disamping itu, John Dewey juga mengungkapkan beberapa pandangannya berkaitan dengan konsep demokrasi pendidikan, di antaranya adalah:

a. *Education as a necessity of life*

John Dewey memandang bahwa pendidikan merupakan kebutuhan hidup dan mengartikan pendidikan sebagai bentuk transmisi yang dilakukan melalui komunikasi. Hal tersebut tidak lepas dari pandangan bahwa hidup itu sendiri pada dasarnya adalah proses perbaikan diri. Maka kelestarian hidup itu hanya dapat

dijaga dengan perbaikan yang konstant yaitu pendidikan.

b. *Education as a social function*

Masyarakat dalam pendidikan tidak hanya sebagai sebuah tempat dan perantara interaksi watak seorang dengan lingkungan saja, melainkan keseluruhan aktifitas seseorang terutama dalam melakukan aktifitas fisik sebagai pengaruh salah seorang dalam kelompok tersebut yang akan mengalami perubahan secara gradual. Perubahan yang mengacu kepada perubahan yang gradual tersebut adalah efek pendidikan. Dan masing-masing individu mempunyai tujuan atau partisipasi dalam beberapa aktivitasnya.

c. *Education as direction*

Pada situasi sosial tertentu anak berhubungan langsung dengan perbuatan mereka, untuk apa mereka melakukan dan berbuat secara tiba-tiba. Aktivitas mereka ini secara langsung merupakan hasil dari pengertian dari partisipasi - partisipasinya

yang menyebabkan perbe dan antara penampilan dan tindakan seseorang. Hal ini merupakan akhir dari sebuah tindakan sebagai pokok dari kontrol sosial secara tidak langsung.

D. Howard Gardner

1. Biografi Singkat



Howard Gardner adalah seorang ahli psikologi perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education, Harvard University Amerika Serikat. Gardner dilahirkan di Scranton, Pennsylvania, pada tahun 1943. Ia menikah dengan Ellen Winner, psikolog

perkembangan yang mengajar di Boston College dan dikaruniai empat anak: Kerith (1969), Jay (1971), Andrew (1976), dan Benjamin (1985). Keinginan yang kuat untuk maju dan berkembang serta kegandrungannya terhadap musik menyebabkan Gardner menolak keinginan orang tuanya untuk menyekolahkanya di Philips Academy di Massachusetts, ia bahkan pergi sekolah ke Wyoming Seminary di Kingston. Di sekolah tersebut Gardner banyak dukungan dan perhatian dari guru-gurunya, sampai akhirnya sukses menyelesaikan studinya. Pada tahun 1961 Gardner menyelesaikan studinya di sekolah tersebut.

Kemudian Gardner melanjutkan studinya ke Harvard University, tempat dimana ia mengabdikan dirinya sekarang. Di universitas tersebut Gardner mempelajari sejarah sebagai persiapan karier di bidang hukum, khususnya pengacara. Selain itu, Gardner juga banyak belajar tentang sosiologi dan psikologi. Di universitas itu ia juga banyak

bertemu dengan orang-orang yang banyak memberinya inspirasi untuk membuat penelitian khusus tentang hukum alam manusia, mereka adalah pakar psikoanalisis Eric Erikson (orang yang telah memperkuat ambisinya untuk menjadi akademikus), sosiolog David Riesman, dan Psikologi kognisi, Jerome Bruner. Gardner berhasil memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang psikologi dan ilmu pengetahuan sosial pada tahun 1965. Dari sini ia bekerja bersama Jerome Bruner dalam MASOC Project. Dalam perjalanan kariernya di proyek tersebut, dia banyak membaca karya-karya Claude Levi-Strauss dan Jean Piaget bahkan bangkitnya minat Gardner untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai “perkembangan” juga terinspirasi dari karya Jean Piaget mengenai tahap perkembangan kognisi manusia.

Pada tahun 1966 Gardner melanjutkan program doktornya di Harvard University dan selesai pada tahun 1971. Selama di Harvard University ia dilatih menjadi seorang

psikolog perkembangan kemudian menjadi seorang neurolog. Berdasarkan hasil penyeleksian dari berbagai institusi tempat dia menuntut ilmu, terutama di Universitas Harvard, akhirnya dia menjadi seorang ahli dalam bidang psikologi, neurologi, bahkan pendidikan. Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang, akhirnya saat ini dia telah menjadi seorang professor Neurologi di sekolah Kedokteran Universitas Boston dan direktur senior Proyek Zero.

2. Pemikiran Howard Gardner

Howard Gardner berpendapat bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Paradigma ini menentang teori dikotomi cerdas-tidak cerdas. Gardner juga menentang anggapan “cerdas” dari sisi IQ (*intellectual quotion*), yang menurutnya hanya mengacu pada tiga jenis kecerdasan, yakni logiko-matematik, linguistik, dan spasial. Untuk selanjutnya, Howard Gardner, kemudian memunculkan istilah *multiple intelligences*. Teori *multiple intelligences* mulai Howard

Gardner diperkenalkan pada tahun 1983 dalam bukunya yang berjudul *Frame of Mind* berdasarkan penelitian yang telah ia lakukan. Selanjutnya pada tahun 1993 dia mempublikasikan bukunya yang berjudul *Multiple Intelligences: The Theory in Practice*, sebagai penyempurnaan atas buku yang terbit sebelumnya setelah banyak melakukan penelitian tentang implikasi sekaligus aplikasi teori kecerdasan majemuk di dunia pendidikan di Amerika Serikat. Teori ini disempurnakan lagi dengan terbitnya buku *Multiple Intelligences Reframed* pada tahun 1999. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi teori melalui penelitian yang rumit, melibatkan antropologi, psikologi kognitif, psikologi perkembangan, psikometri, studi biografi, fisiologi hewan, dan neuroanatomi.

Bagi para pendidik dan implikasinya bagi pendidikan, teori multiple intelligences melihat anak sebagai individu yang unik. Pendidik akan melihat bahwa ada berbagai variasi dalam belajar, di mana setiap variasi

menimbulkan konsekuensi dalam cara pandang dan evaluasinya. Kecerdasan menurut paradigma *multiple intelligences* dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang mempunyai tiga komponen utama, yakni:

- a. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari - hari;
- b. Kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan;
- c. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang.

Besarnya pengaruh dan banyaknya penelitian yang dia lakukan di bidang psikologi akhirnya mengantarkan dia menjadi orang terkenal di dunia pendidikan, terutama sejak dikembangkannya teori kecerdasan majemuk (*multiple intelligences*). Menurut penelitian Howard Gardner, di dalam diri setiap anak tersimpan sembilan jenis

kecerdasan yang siap berkembang. Ia memetakan lingkup kemampuan manusia yang luas tersebut menjadi sembilan kategori yang komprehensif atau sembilan macam kecerdasan dasar sebagaimana yang diilustrasikan gambar berikut:



Gambar 6. Kecerdasan Majemuk (*Multiple Intelligences*)

Howard Gardner

- a. Kecerdasan linguistik (*Linguistic intelligence*)

Kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata – kata secara efektif baik secara oral maupun secara tertulis, contohnya pencipta puisi, editor, jurnalis,

dramawan, sastrawan, orator. Tokoh terkenal seperti : Sukarno, Paus Yohanes Paulus II, Winston Churchill.

b. Kecerdasan matematis-logis (*Logical - mthematical intelligence*)

Kemampuan ini berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika . Jalan pikiran bernalar dengan mudah mengembangkan pola sebab akibat. .contohnya matematikus, programer, logikus. Tokoh terkenal seperti: Einstein (ahli fisika), Habibie (ahli pesawat)

c. Kecerdasan ruang (*spatial intelligence*)

Kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat dan kemampuan untuk mengenal bentuk dan benda secara tepat serta mempunyai daya imajinasi secara tepat. Contohnya pemburu, arsitek, dekorator. Tokoh terkenal seperti Sidharta (pemahat), Pablo Pacasso (pelukis).

d. Kecerdasan kinestetik-badani (*bodily-kinesthetic intelligence*)

Kemampuan menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan. Contohnya aktor, atlet, penari ahli bedah. Tokoh terkenal seperti: Charlie Chaplin (pemain pantonim yang ulung), Steven Seagal (actor)

e. Kecerdasan musical (*Musical intelligence*)

Kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan dan menikmati bentuk – bentuk musik dan suara, peka terhadap ritme, melodi, dan intonasi serta kemampuan memainkan alat musik. Contohnya komponis. Tokoh terkenal seperti Beethoven, Mozart.

f. Kecerdasan interpersonal (*Interpersonal intelligence*)

Kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, temperamen orang lain. Kemampuan yang menonjol dalam berelasi dan berkomunikasi dengan berbagai orang. Contohnya komunikator, fasilitator. Tokoh terkenal Mahatma Gandhi (tokoh

perdamaian India), Ibu Teresa (Pejuang kaum miskin).

g. Kecerdasan intrapersonal (*Intrapersonal intelligence*)

Kemampuan berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasar pengalaman diri serta mampu berefleksi dan keseimbangan diri, kesadaran tinggi akan gagasan – gagasan. Mereka mudah berkonsentrasi dengan baik, suka bekerja sendiri dan cenderung pendiam. Contohnya, para pendoa batin.

h. Kecerdasan lingkungan/naturalis (*Naturalist intelligence*)

Kemampuan untuk mengerti flora dan fauna dengan baik, menikmati alam, mengenal tanaman dan binatang dengan baik. Tokoh terkenal Charles Darwin

i. Kecerdasan eksistensial (*Existential intelligence*)

Kemampuan menyangkut kepekaan dan kemampuan seseorang untuk menjawab

persoalan – persoalan terdalam keberadaan atau eksistensi manusia. Contohnya persoalan mengapa ada, apa makna hidup ini. Tokoh terkenal seperti Plato, Sokrates, Thomas Aquinas.



Evaluasi

1. Menurut anda, apa kelebihan dan kekurangan gagasan pemikiran dari keempat tokoh pendidikan tersebut!
2. Tuliskan inspirasi yang anda peroleh dari tokoh – tokoh pendidikan yang diuraikan di atas!

BAB 12

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA BANGSA

Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 telah dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut John Dewey, pendidikan adalah suatu proses pengalaman karena kehidupan adalah pertumbuhan. Pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan ialah proses menyesuaikan pada tiap-tiap fase serta menambahkan kecakapan di dalam perkembangan seseorang. Jadi, dapat

disimpulkan bahwa pendidikan adalah upaya yang direncanakan untuk memengaruhi individu agar menjadi lebih baik di masa yang mendatang.

Selanjutnya, kata karakter berasal dari bahasa Yunani *charassein*, yang berarti *to engrave* (melukis, menggambar), seperti orang yang melukis kertas, memahat batu atau metal. Berakar dari pengertian yang seperti itu, karakter kemudian diartikan sebagai tanda atau ciri yang khusus, dan karenanya melahirkan satu pandangan bahwa karakter adalah pola perilaku yang bersifat individual, keadaan moral seseorang. Al-Ghazali menggambarkan bahwa akhlak atau karakter adalah tingkah laku seseorang yang berasal dari hati yang baik. Sementara seorang tokoh psikologi Amerika yang bernama Alport, mendefinisikan karakter sebagai penentu bahwa seseorang sebagai pribadi (*character is personality evaluated*). Oleh karena itu, yang dimaksud karakter adalah sifat yang mantap, stabil, dan khusus yang melekat pada pribadi seseorang.

Dari konsep tersebut, maka muncullah istilah pendidikan karakter (*character education*). Pendidikan karakter adalah usaha aktif untuk membentuk kebiasaan baik, sehingga sifat anak sudah terukir sejak kecil. Doni Koesoema berpendapat bahwa pendidikan karakter dapat dipahami sebagai sebuah usaha yang dilakukan secara individu dan sosial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kebebasan individu itu sendiri. Sebuah keutamaan akan muncul dalam diri individu ketika ia mampu menyempurnakan diri menjadi semakin lebih baik. Hasil - Hasil usaha ini dapat dilihat melalui perilaku dan kepusannya. Manusia yang tadinya tidak memiliki karakter, melalui pelatihan lantas memiliki kualitas tambahan yang disebut kemampuan untuk berbuat baik, bertanggung jawab dan lain-lain. Dalam pengertian sederhana, menurut Muclas Samani dan Hariyanto, pendidikan karakter adalah hal positif apa saja yang dilakukan guru dan berpengaruh kepada peserta didik yang diajarkannya. Thomas Lickona menyatakan bahwa

pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif saja, akan tetapi lebih berorientasi pada proses pembinaan potensi yang ada dalam diri peserta didik, dikembangkan melalui pembiasaan sifat - sifat baik yaitu berupa pengajaran nilai - nilai karakter yang baik.

Koentjaraningrat menyatakan bahwa kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal, sehingga menurutnya kebudayaan dapat diartikan sebagai hal- hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, ada juga yang berpendapat sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi- daya yang artinya daya dari budi atau kekuatan dari akal. Meneruskan pernyataannya, bahwasannya terdapat tiga wujud dari unsur kebudayaan, yaitu

pertama ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. *Kedua*, aktifitas berpola manusia dalam sebuah komoditas masyarakat.

Budaya menampakkan diri dalam pola komunikasi, kegiatan, dan perilaku yang berfungsi sebagai model bagi tindakan penyesuaian diri dalam suatu sistem organisasi tertentu menjadi budaya organisasi. Jadi, budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat dan berkenaan dengan cara manusia hidup, belajar berfikir, merasa, mempercayai, dan mengusahakan apa yang patut menurut budayanya. Budaya dalam hal ini merupakan tingkah laku dan gejala sosial yang menggambarkan identitas dan citra suatu masyarakat atau negara. Kendati kebudayaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Di mana

sifat-sifat budaya itu akan memiliki ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Setiap orang terlibat dalam proses perubahan nilai dan budaya. Jadi, budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kebiasaan atau karakter masyarakatnya.

A. Hubungan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa

Menurut H.A.R Tilaar, kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan, bahkan kebudayaan merupakan alas atau dasar pendidikan. Kebudayaan yang menjadi alas pendidikan tersebut haruslah bersifat kebangsaan. Dengan demikian kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan yang riil yaitu budaya yang hidup di dalam masyarakat kebangsaan Indonesia. Sedangkan pendidikan mempunyai arah untuk mewujudkan keperluan perikehidupan dari seluruh aspek kehidupan manusia dan arah tujuan pendidikan untuk mengangkat derajat dan harkat manusia.

Dalam pendidikan karakter berbasis budaya, kebudayaan dimaknai sebagai sesuatu yang diwariskan atau dipelajari, kemudian meneruskan apa yang dipelajari serta mengubahnya menjadi sesuatu yang baru, itulah inti dari proses pendidikan. Maka, tugas pendidikan sebagai misi kebudayaan harus mampu melakukan proses; *pertama* pewarisan kebudayaan, *kedua* membantu individu memilih peran sosial dan mengajari untuk melakukan peran tersebut, *ketiga* memadukan beragam identitas individu ke dalam lingkup kebudayaan yang lebih luas, *keempat* harus menjadi sumber inovasi sosial. Tahapan – tahapan tersebut mencerminkan jalinan hubungan fungsional antara pendidikan dan kebudayaan yang mengandung dua hal utama, yaitu : *pertama*, bersifat reflektif, pendidikan merupakan gambaran kebudayaan yang sedang berlangsung. *Kedua*, bersifat progresif, pendidikan berusaha melakukan pembaharuan, inovasi agar kebudayaan yang ada dapat mencapai kemajuan.

Budaya dan karakter tidak bisa dibentuk dan dibangun dalam waktu yang singkat. Membangun budaya dan karakter bangsa membutuhkan waktu yang lama dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menegaskan kembali fungsi dan tujuan pendidikan nasional kita. Pada Pasal 3 UU ini ditegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi, pendidikan nasional merupakan usaha terencana untuk membangun budaya dan karakter bangsa Indonesia.

Saat ini pendidikan karakter mutlak harus direvitalisasi kembali. Hal tersebut dikemukakan mengingat dekadensi moral di era globalisasi dewasa ini, dinilai telah sangat mengkhawatirkan. Ini juga merupakan bentuk-bentuk liberalisasi budaya. Karenanya, agar masyarakat dapat terjaga dari serangan budaya yang tidak sesuai dengan norma-norma budaya Pancasila sebagai moral bangsa, pendidikan karakter perlu di revitalisasi. Pendidikan adalah proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda dan juga proses pengembangan budaya dan karakter bangsa untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang. Dalam proses pendidikan budaya dan karakter bangsa, secara aktif peserta didik mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses internalisasi, dan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang

bermartabat. Karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang.

Pendidikan yang berbasis karakter dan budaya bangsa adalah pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi ke arah pembentukan karakter anak bangsa pada peserta didiknya melalui kurikulum terintegrasi yang dikembangkan di sekolah. Kerangka pengembangan karakter dan budaya bangsa melalui pembelajaran di kalangan tenaga pendidik dirasakan sangat penting. Sebagai agen perubahan, pendidik diharapkan mampu menanamkan ciri-ciri, sifat, dan watak serta jiwa mandiri, tanggung jawab, dan cakap dalam kehidupan kepada peserta didiknya. Di samping itu, karakter tersebut juga sangat diperlukan bagi seorang pendidik karena melalui jiwa ini, para pendidik akan memiliki orientasi kerja yang lebih efisien, kreatif, inovatif, produktif serta mandiri.

B. Urgensi Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa

Pendidikan saat ini hanya mengedepankan penguasaan aspek keilmuan dan kecerdasan peserta didik. Jika peserta didik sudah mencapai nilai atau lulus dengan nilai akademik memadai maupun di atas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), pendidikan dianggap sudah berhasil. Pembentukan karakter dan nilai-nilai budaya bangsa di dalam diri peserta didik semakin terpinggirkan. Rapuhnya karakter dan budaya dalam kehidupan berbangsa bisa membawa kemunduran peradaban bangsa. Padahal, kehidupan masyarakat yang memiliki karakter dan budaya yang kuat akan semakin memperkuat eksistensi suatu bangsa dan negara. Pengembangan pendidikan berbasis karakter dan budaya bangsa perlu menjadi program nasional. Dalam pendidikan, pembentukan karakter dan budaya bangsa pada peserta didik tidak harus masuk kurikulum. Nilai-nilai yang ditumbuhkembangkan dalam diri peserta didik berupa nilai-nilai dasar yang disepakati secara nasional. Nilai-nilai yang dimaksudkan di antaranya adalah kejujuran, dapat dipercaya,

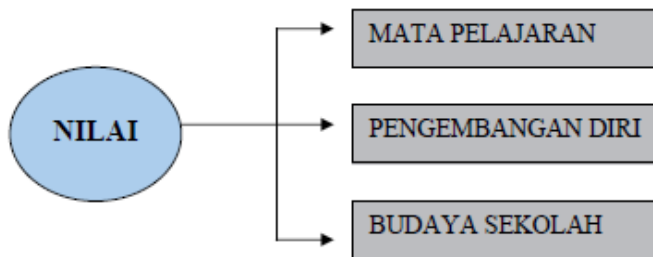
kebersamaan, toleransi, tanggung jawab, dan peduli kepada orang lain. Franz Magnis-Suseno berpendapat bahwa pada era sekarang ini yang dibutuhkan bukan hanya generasi muda yang berkarakter kuat, tetapi juga benar, positif, dan konstruktif. Namun, untuk membentuk peserta didik yang berkarakter kuat, tidak boleh ada feodalisme para pendidik. Jika pendidik membuat peserta didik menjadi "*manutan*" (*obedient*) dengan nilai-nilai penting, tenggang rasa, dan tidak membantah, karakter peserta didik tidak akan berkembang. Kalau kita mengharapkan karakter, peserta didik itu harus diberi semangat dan didukung agar ia menjadi pemberani, berani mengambil inisiatif, berani mengusulkan alternatif, dan berani mengemukakan pendapat yang berbeda. Kepada peserta didik, perlu diajarkan cara berpikir sendiri.

Untuk pengembangan pendidikan berbasis karakter dan budaya bangsa, dibutuhkan masukan, antara lain, menyangkut model-model pengembangan karakter dan budaya bangsa

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Kebutuhan terus harus dimaknai serius karena memerlukan banyak pengorbanan. Kerisauan dan kerinduan banyak pihak untuk kembali memperkuat pendidikan karakter dan budaya bangsa perlu direspons dengan baik. Karena itu, data akurat yang menyangkut model - model pengembangan karakter dan budaya bangsa perlu digali dan dilaksanakan melalui kajian empiris, yakni kegiatan penelitian. Syarat menghadirkan pendidikan karakter dan budaya bangsa di sekolah harus dilakukan secara holistik. Pendidikan karakter tidak bisa terpisah dengan bentuk pendidikan yang sifatnya kognitif atau akademik. Konsep pendidikan tersebut harus diintegrasikan ke dalam kurikulum. Hal ini tidak berarti bahwa pendidikan karakter akan diterapkan secara teoretis, tetapi menjadi penguat kurikulum yang sudah ada, yaitu dengan mengimplementasikannya dalam mata pelajaran dan keseharian peserta didik didik.

C. Strategi Penguatan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa di Sekolah

Berbagai strategi pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya bangsa dilakukan oleh kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan (konselor) secara bersama-sama sebagai suatu komunitas pendidik dan diterapkan ke dalam kurikulum melalui hal-hal berikut ini:



Gambar 7. Pengembangan Nilai-Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

1. Pengintegrasian dalam mata pelajaran

Pengembangan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa diintegrasikan dalam setiap materi pembelajaran pada seluruh mata pelajaran. Nilai-nilai tersebut dirancang dan diimplementasikan dalam perencanaan

pembelajaran, seperti capaian pembelajaran (CP), alur tujuan pembelajaran (ATP), dan modul ajar. Pengembangan nilai-nilai itu dalam perencanaan pembelajaran ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengkaji Capaian Pembelajaran (CP) untuk mengidentifikasi potensi pengintegrasian nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang relevan dengan kompetensi yang diharapkan.
- b. Menganalisis keterkaitan antara tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan profil pelajar untuk menentukan nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan.
- c. Mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa ke dalam modul ajar, termasuk pada komponen tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, serta asesmen.
- d. Mengembangkan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, aktif, dan kontekstual sehingga memberikan kesempatan Kepada peserta didik untuk

menginternalisasi nilai-nilai karakter dan menunjukkannya dalam perilaku yang nyata.

- e. Memberikan pendampingan dan penguatan kepada peserta didik, baik bagi yang mengalami kesulitan dalam menginternalisasi nilai-nilai karakter maupun dalam menerapkannya dalam perilaku sehari-hari.

2. Program Pengembangan Diri

Dalam program pengembangan diri, perencanaan dan pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui pengintegrasian ke dalam kegiatan sehari-hari sekolah, yaitu melalui hal-hal berikut.

- a. Kegiatan rutin sekolah dan ekstrakurikuler

Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus menerus dan konsisten setiap saat. Contoh kegiatan ini adalah upacara pada hari besar kenegaraan, pemeriksaan

kebersihan badan (kuku, telinga, rambut, dan lain-lain) setiap hari Senin, beribadah bersama atau shalat bersama setiap dhuhur (bagi yang beragama Islam), berdoa waktu mulai dan selesai pelajaran, mengucapkan salam bila bertemu guru, tenaga kependidikan, atau teman. Selain itu, adanya kegiatan ekstrakurikuler juga bisa menjadi wadah dalam penguatan pendidikan karakter di luar kegiatan belajar mengajar, seperti: ekstrakurikuler tari, berpidato, qiro'ah, dsb.

b. Kegiatan spontan

Kegiatan spontan yaitu kegiatan yang dilakukan secara spontan pada saat itu juga. Kegiatan ini dilakukan biasanya pada saat guru dan tenaga kependidikan yang lain mengetahui adanya perbuatan yang kurang baik dari peserta didik yang harus dikoreksi pada saat itu juga. Apabila guru mengetahui adanya perilaku dan sikap yang kurang baik maka pada saat itu juga guru harus melakukan koreksi sehingga

peserta didik tidak akan melakukan tindakan yang tidak baik itu. Contoh kegiatan itu: membuang sampah tidak pada tempatnya, berteriak-teriak sehingga mengganggu pihak lain, berkelahi, memalak, berlaku tidak sopan, mencuri, berpakaian tidak senonoh. Kegiatan spontan berlaku untuk perilaku dan sikap peserta didik yang tidak baik dan yang baik sehingga perlu dipuji, misalnya: memperoleh nilai tinggi, menolong orang lain, memperoleh prestasi dalam olah raga atau kesenian, berani menentang atau mengkoreksi perilaku teman yang tidak terpuji.

c. Keteladanan

Keteladanan adalah perilaku dan sikap guru dan tenaga kependidikan yang lain dalam memberikan contoh terhadap tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik untuk mencontohnya. Jika guru dan tenaga kependidikan yang lain

menghendaki agar peserta didik berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa maka guru dan tenaga kependidikan yang lain adalah orang yang pertama dan utama memberikan contoh berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai itu. Misalnya, berpakaian rapi, datang tepat pada waktunya, bekerja keras, bertutur kata sopan, kasih sayang, perhatian terhadap peserta didik, jujur, menjaga kebersihan.

d. Pengkondisian

Untuk mendukung keterlaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa maka sekolah harus dikondisikan sebagai pendukung kegiatan itu. Sekolah harus mencerminkan kehidupan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang diinginkan. Misalnya, toilet yang selalu bersih, bak sampah ada di berbagai tempat dan selalu dibersihkan, sekolah

terlihat rapi dan alat belajar ditempatkan teratur.

3. Budaya Sekolah

Budaya sekolah cakupannya sangat luas, umumnya mencakup ritual, harapan, hubungan, demografi, kegiatan kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, proses mengambil keputusan, kebijakan maupun interaksi sosial antarkomponen di sekolah. Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah tempat peserta didik berinteraksi dengan sesamanya, guru dengan guru, konselor dengan sesamanya, pegawai administrasi dengan sesamanya, dan antar anggota kelompok masyarakat sekolah. Interaksi internal kelompok dan antar kelompok terikat oleh berbagai aturan, norma, moral serta etika bersama yang berlaku di suatu sekolah. Kepemimpinan, keteladanan, keramahan, toleransi, kerja keras, disiplin, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, rasa kebangsaan, dan tanggung jawab merupakan nilai - nilai yang dikembangkan dalam budaya

sekolah. Pengembangan nilai - nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa dalam budaya sekolah mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan kepala sekolah, guru, konselor, tenaga administrasi ketika berkomunikasi dengan peserta didik dan menggunakan fasilitas sekolah.

Selain itu, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pendidikan karakter dan budaya bangsa, diantaranya yaitu:

1. Berkelanjutan; mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa merupakan sebuah proses panjang, dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan.
2. Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah; mensyaratkan bahwa proses pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui setiap mata pelajaran, dan dalam setiap kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.

3. Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan; mengandung makna bahwa materi nilai budaya dan karakter bangsa bukanlah bahan ajar biasa; artinya, nilai-nilai itu tidak dijadikan pokok bahasan yang dikemukakan seperti halnya ketika mengajarkan suatu konsep, teori, prosedur, ataupun fakta.



Gambar 8. Warung Kejujuran

4. Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan; prinsip ini menyatakan bahwa proses pendidikan nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan oleh peserta didik bukan oleh guru. Prinsip ini juga menyatakan bahwa proses pendidikan dilakukan dalam suasana belajar yang

menimbulkan rasa senang dan tidak indoktrinatif.



Evaluasi

1. Jelaskan secara ringkas konsep pendidikan karakter dan budaya bangsa yang telah anda pelajari!
2. Bagaimana strategi yang efektif untuk menerapkan penguatan pendidikan karakter dan budaya bangsa di sekolah!

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Ahmadi, Rulam, *Pengantar Pendidikan; Asas Pendidikan dan Filsafat*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015.
- Ali, H.B. Hamdani, *Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: Kota Kembang, 2001.
- Bafadhol, Ibrahim, "Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Islam*, 11, Januari, 2017.
- Darmadi, Hamid, *Pengantar Pendidikan Era Globalisasi*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Darwis dan Hikmawati Mas'ud, *Kesehatan Masyarakat dalam Perspektif Sosioantropologi*, Makassar: Sah Media, 2017.
- Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009.
- Djumransjah. *Pengantar Filsafat Pendidikan*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Fathurrohman, Pupuh, dkk., *Pengembangan Pendidikan Karakter*, Bandung: Refika Aditama, 2017.

- Hasbullah, *Dasar – Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ihsan, Fuad, *Dasar – Dasar Kependidikan*, Rineka Cipta: Jakarta, 2013.
- Indar, M. Djumberansyah, *Filsafat Pendidikan*, Surabaya: Karya Abditama, 1994.
- Kementerian Pendidikan Nasional. *Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan. 2010.
- Kholik, Abdul, dkk. *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Bogor: UNIDA Press, 2017.
- Laksana, Sigit Dwi, “Integrasi Empat Pilar Pendidikan (UNESCO) dan Tiga Pilar Pendidikan Islam.” *Al-Idarah* 6, no. 1, 2016.
- Maunah, Binti, *Landasan Pendidikan*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Neoloka, Amos, *Landasan Pendidikan; Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*, Depok: Kencana, 2017
- Pidarta, Made, *Landasan Kependidikan; Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

- Purwanto, Ngalim, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Rusn, Abidin Ibnu, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Santrock, John W., *Psikologi Pendidikan Terj.*, Triw Wibowo, Jakarta: Kencana, 2007.
- Tafsir, Ahmad, *Filsafat Pendidikan Islam: Integrasi Jasmani, Rohani, dan Kalbu Memanusiakan Manusia*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2012.
- Tim Dosen FIP IKIP Malang, *Pengantar Dasar – Dasar Kependidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1988.
- Tirtarahardja, Umar dan S.L. La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Triwiyanto, Teguh, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Soejono, Ag., *Aliran – Aliran Baru dalam Pendidikan*, Bandung: CV Ilmu, 1978.
- Syah, Muhibbin, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Wahab, Rochmad, *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. (Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo, 2011.
- Yudha, Rahmat Putra, *27 Karakter Tauladan Tokoh Indonesia*, Pontianak: PGRI, 2019.